

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**PERUBAHAN BADAN KEAMANAN RAKYAT MENJADI TENTARA
NASIONAL INDONESIA DARI TAHUN 1945-1948**

MAKALAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Sejarah



Disusun oleh:

Geovani Louisa Gospa Cotera

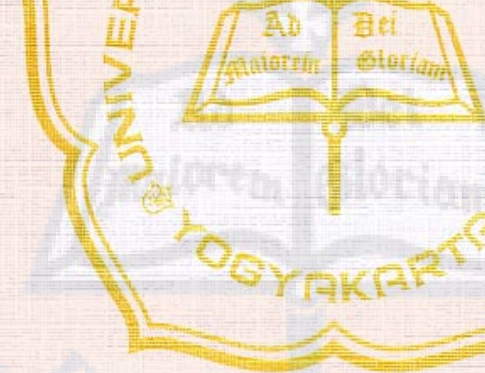
NIM: 101314012

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2014

MAKALAH
PERUBAHAN BADAN KEAMANAN RAKYAT MENJADI TENTARA
NASIONAL INDONESIA DARI TAHUN 1945-1948

Oleh
Geovani Louisa Gospa Cötera
NIM: 101314012



Telah disetujui oleh:

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A.K. Wiharyanto', is written over a faint blue watermark of the university logo.

Drs. A.K. Wiharyanto, M.M.

Tanggal, 29 September 2014

MAKALAH

PERUBAHAN BADAN KEAMANAN RAKYAT MENJADI TENTARA
NASIONAL INDONESIA DARI TAHUN 1945-1948

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

Geovani Louisa Gospa Cotera

NIM: 101314012

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji

Pada tanggal 16 Oktober 2014

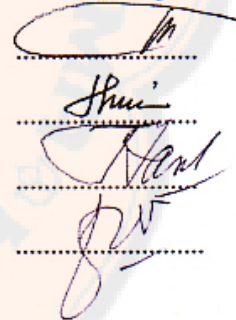
Dan dinyatakan telah menempuh syarat

Susunan Panitia Penguji

Nama lengkap

Ketua : Indra Darmawan, S.E., M.Si.
Sekertaris : Dra. Th. Sumini, M.Pd.
Anggota : Drs. A. Kardiyat Wiharyanto, M.M.
Anggota : Drs. B. Musidi, M.Pd

Tanda Tangan



Yogyakarta, 16 Oktober 2014

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sanata Dharma

Dekan.



Rohandi, Ph.D

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

MOTTO

*† Untuk segala sesuatu ada waktunya
Ya membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ya
memberikan kekekalan dalam hati mereka.*

(Pengkotbah Pasal 3)

*† Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh
kepercayaan, kamu akan menerimanya.*

(Matius 21:22)

*† Setiap pencapaian yang bermanfaat, besar atau kecil,
memiliki tahap yang membosankan dan keberhasilan: sebuah
permulaan, sebuah perjuangan dan sebuah kemenangan.*

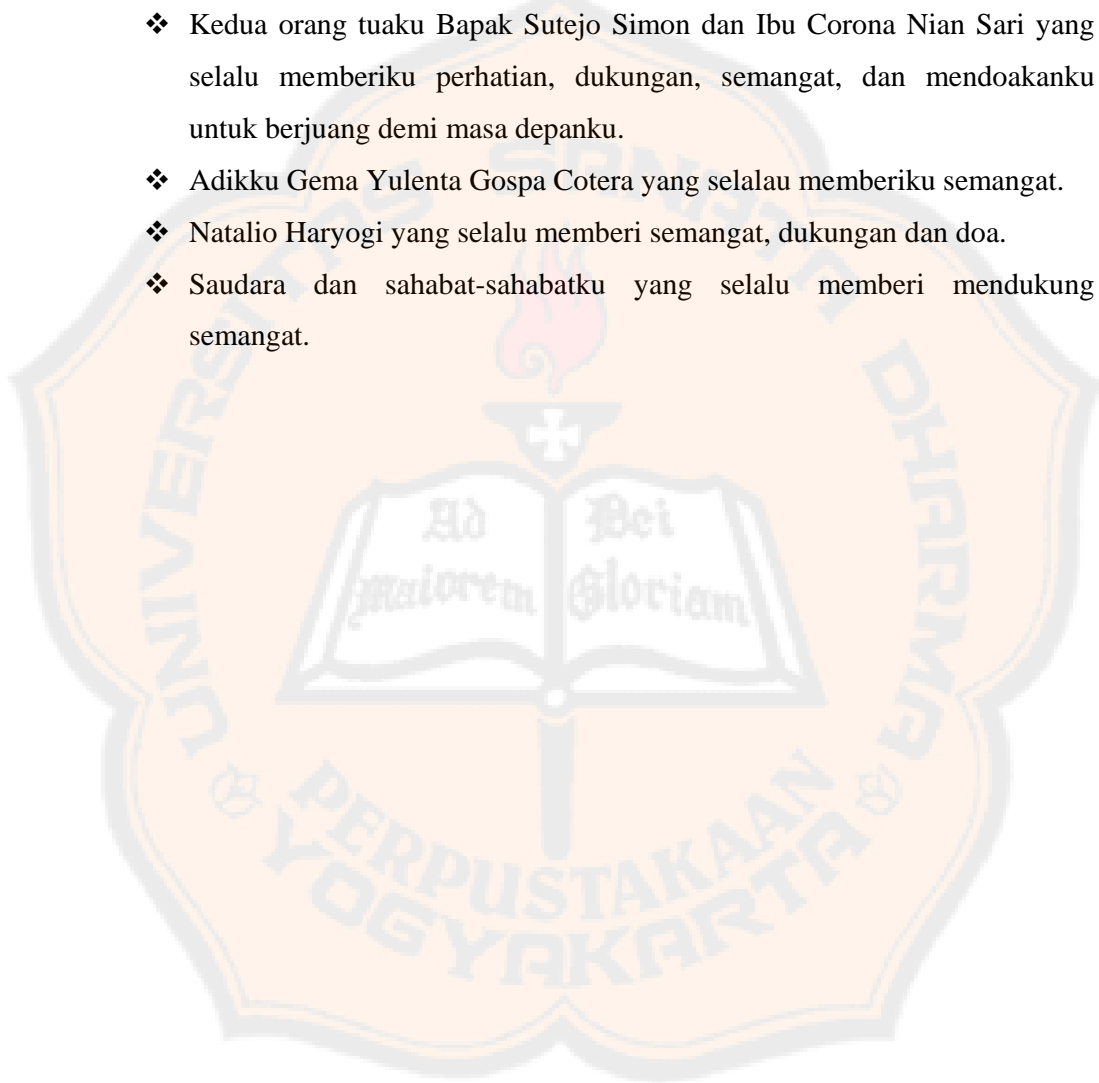
(Mahatma Gandhi)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PERSEMBAHAN

Makalah ini saya persembahkan kepada:

- ❖ Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria teladanku yang senantiasa mendampingi dan melindungiku dalam setiap langkah hidupku.
- ❖ Kedua orang tuaku Bapak Sutejo Simon dan Ibu Corona Nian Sari yang selalu memberiku perhatian, dukungan, semangat, dan mendoakanku untuk berjuang demi masa depanku.
- ❖ Adikku Gema Yulenta Gospa Cotera yang selalau memberiku semangat.
- ❖ Natalio Haryogi yang selalu memberi semangat, dukungan dan doa.
- ❖ Saudara dan sahabat-sahabatku yang selalu memberi mendukung semangat.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

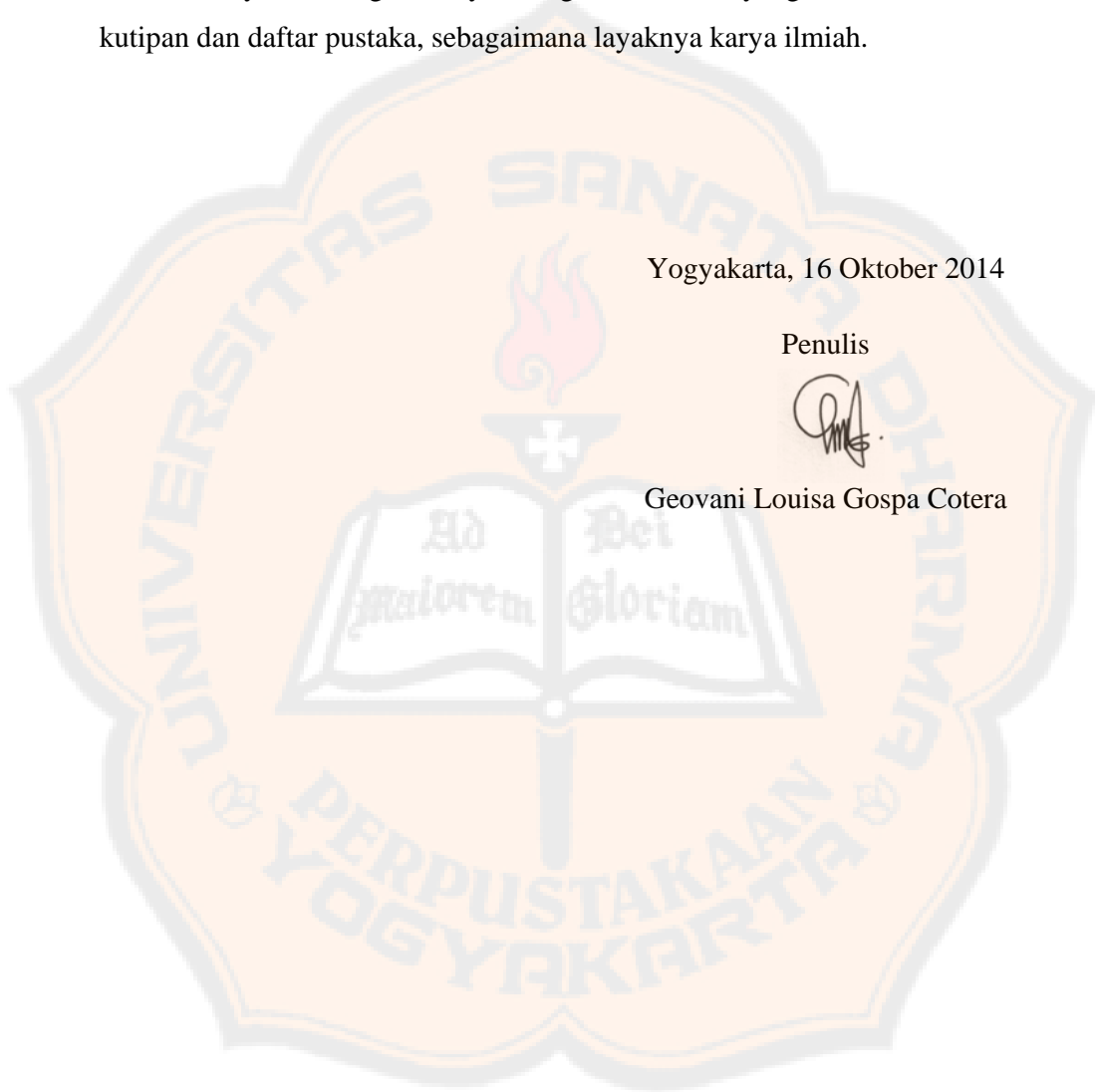
Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa makalah yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 16 Oktober 2014

Penulis



Geovani Louisa Gospa Cotera



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma :

Nama : Geovani Louisa Gospa Cotera

Nomor Mahasiswa : 101314012

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul :

PERUBAHAN BADAN KEAMANAN RAKYAT MENJADI TENTARA NASIONAL INDONESIA DARI TAHUN 1945-1948

Beserta perangkat yang diperlukan. Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengolahnya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Dengan demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal 16 Oktober 2014

Yang menyatakan:



Geovani Louisa Gospa Cotera

ABSTRAK

**PERUBAHAN BADAN KEAMANAN RAKYAT MENJADI TENTARA
NASIONAL INDONESIA DARI TAHUN 1945-1948**

**Geovani Louisa Gospa Cotera
Universitas Sanata Dharma
2014**

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tiga permasalahan pokok, yaitu: 1) Proses lahirnya Badan Keamanan Rakyat; 2) Perkembangan Badan Keamanan Rakyat menjadi Tentara Nasional Indonesia; 3) Pengaruh pembentukan Tentara Nasional Indonesia.

Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode sejarah yang mencakup lima tahapan yaitu perumusan judul, pengumpulan sumber, verifikasi (kritik sumber), interpretasi, penulisan sejarah. Penulisan ini menggunakan pendekatan sosial dan ditulis secara deskriptif analisis.

Hasil yang diperoleh adalah 1) Lahirnya BKR berawal dari bagian Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP), sebagai akibat dari kebijakan untuk menghadapi tantangan dari dalam negeri dan luar negeri. 2) BKR berkembang menjadi TKR, TRI dan akhirnya TNI. 3) Pembentukan TNI menyebabkan laskar yang tidak memenuhi syarat-syarat dikembalikan kepada masyarakat, akhirnya Indonesia mempunyai andalan untuk menjaga dan mempertahankan tegaknya RI.

ABSTRACT

**THE CHANGING OF PEOPLE'S SECURITY CORP INTO INDONESIAN
ARMY FROM 1945-1948**

**Geovani Louisa Gospa Cotera
Sanata Dharma University
2014**

This writing is aimed to describe and analyse three basic problems, which are: 1) The process of birth of the People's Security Corp: 2) The alteration of People's Security Corp into the Indonesian Army: and 3) The influence of the Indonesian Army's formation.

This writing was compiled with historical method consisting of five stages, which are title formulation, data gathering, verification, interpretation, and historiography. It used social approach and was written using descriptive analysis.

The results of this study are: 1) BKR was formed, as part of Helper Association of War Victim's Family (BPKKP) in the beginning to face challenges from inside or outside of the country. 2) BKR later developed into becoming TKR, then TRI and finally TNI. 3) The forming of TNI resulted in the returning of unqualified troops to the civillians. Finally, Indonesian has mainstay troops to protect and save this country.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KATA PENGANTAR

Puji dan srukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya yang telah memberikan Anugrah dan Kasih-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Perubahan Badan Keamanan Rakyat Menjadi Tentara Nasional Indonesia Dari Tahun 1945-1948”. Makalah ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Universitas Sanata Dharma.

Penulis menyadari bahwa penyusunan makalah ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
2. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan makalah ini.
3. Drs. A. Kardiyat Wiharyanto, M. M; selaku dosen pembimbing yang telah sabar membimbing, membantu dan memberikan banyak pengarahan, saran, serta masukan selama penyusunan makalah ini.
4. Seluruh dosen dan pihsk sekretariat Program Studi Pendidikan Sejarah yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama penulis menyelesaikan studi di Universitas Sanata Dharma.
5. Seluruh karyawan Perpustakaan Universitas Sanata Dharma, yang telah memberikan pelayanan dan membantu penulis dalam memperoleh sumber penulisan makalah ini.
6. Sutejo Simon dan Corona Nian Sari selaku orang tua yang selalu mendukung dan mendoakan baik maril maupun material, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas Sanata Dharma, serta seluruh keluarga besarku terimakasih atas dukungan dan doanya.
7. Teman kost dan teman-teman Pendidikan Sejarah angkatan 2010 yang memberi dukungan dan bantuan kalian selama ini.

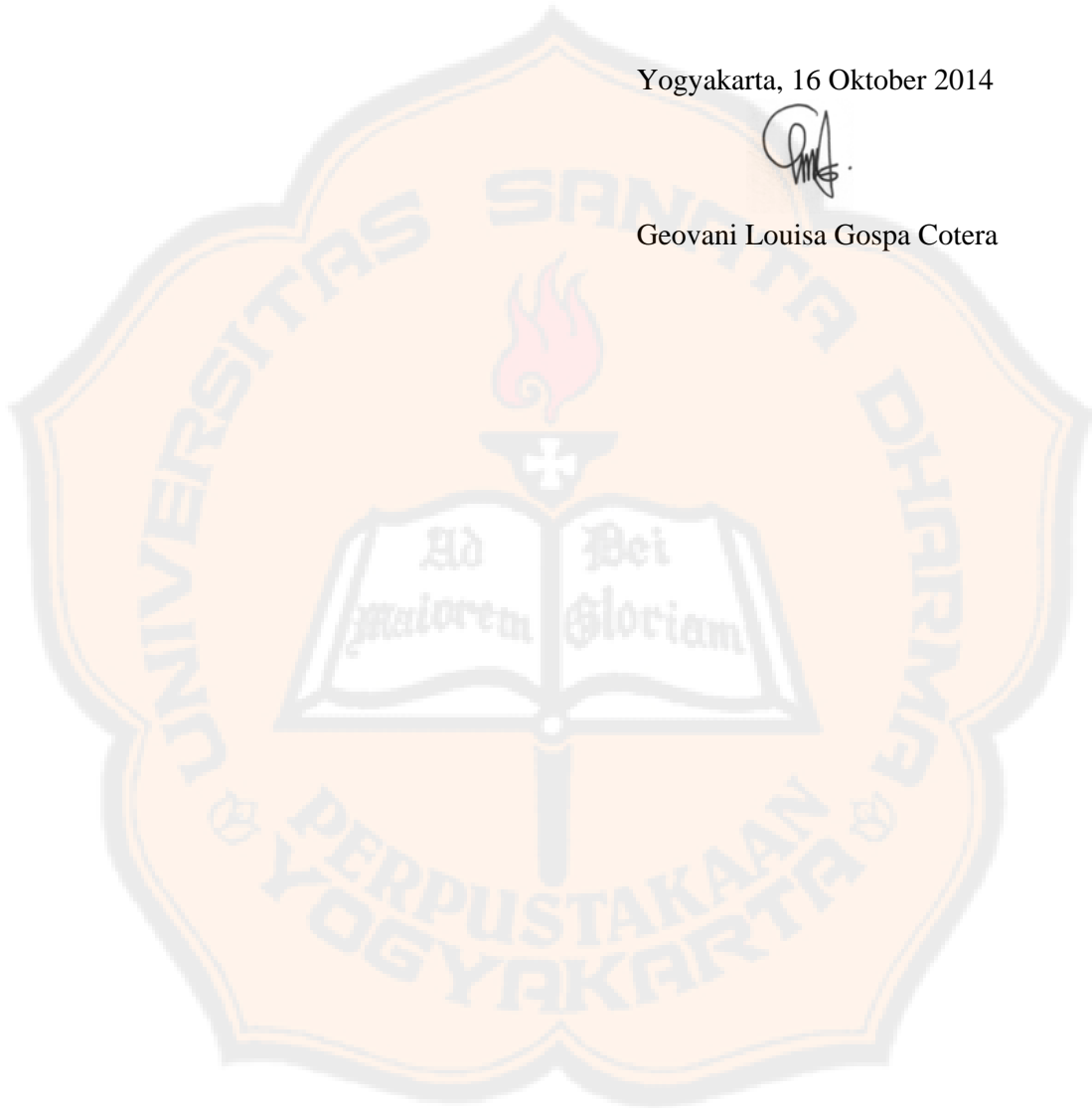
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Penulis menyadari bahwa makalah ini jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun bagi makalah ini. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 16 Oktober 2014



Geovani Louisa Gospa Cotera



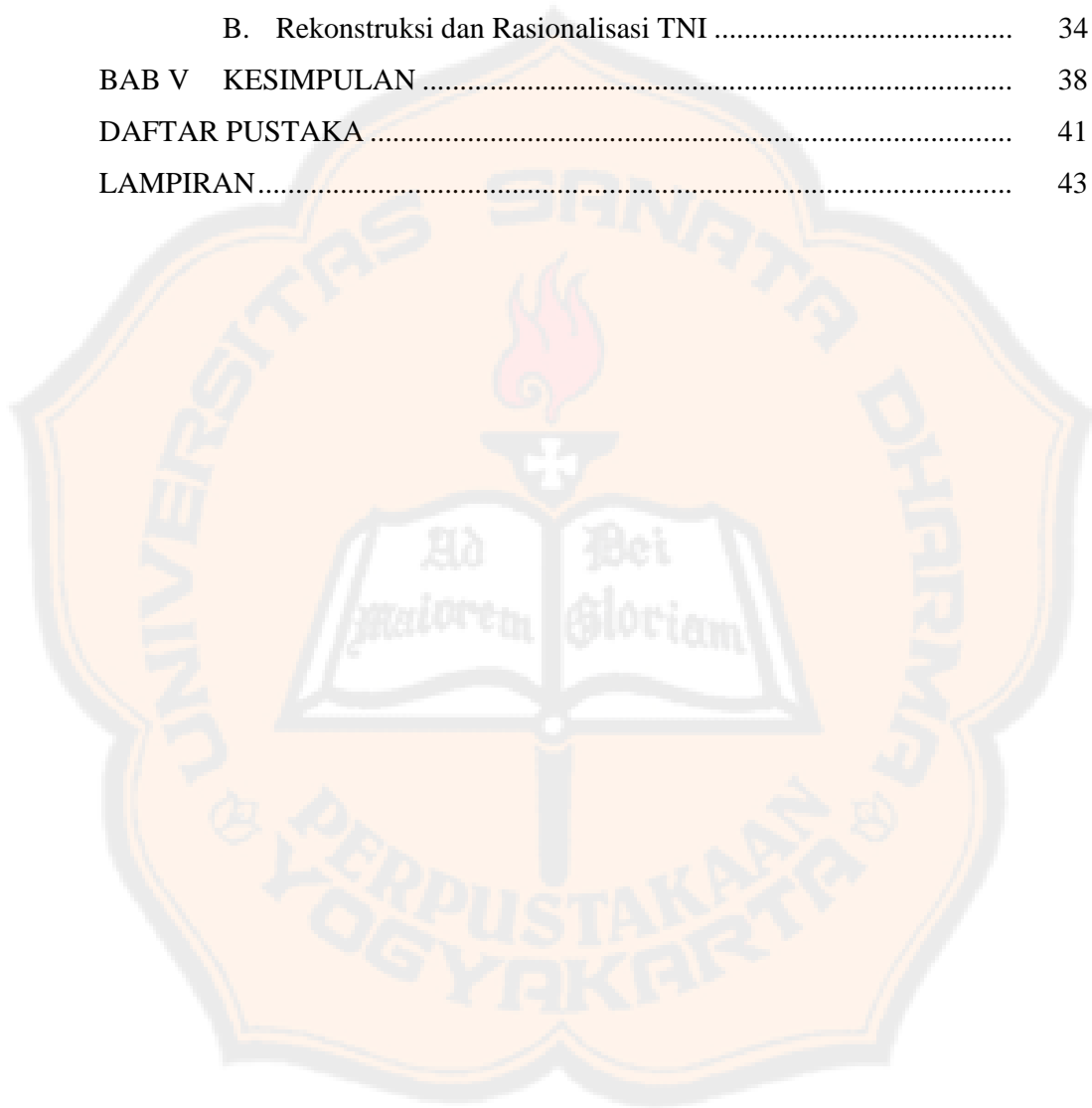
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	vi
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penulisan	5
D. Manfaat Penulisan	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II PROSES LAHIRNYA BADAN KEAMANAN RAKYAT (BKR)	8
A. Pembubaran Tentara PETA Berhubungan Dengan Pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR).....	8
B. Kronologi Terbentuknya Badan Keamanan Rakyat.....	9
C. Proses Lahirnya BKR.....	12
BAB III PERKEMBANGAN BADAN KEAMANAN RAKYAT MENJADI TENTARA NASIONAL INDONESIA	18
A. Lahirnya Kekuatan Sosial-Politik Baru	18

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

B. Lahirnya Tentara Reguler	20
C. Terbentuknya Tentara Nasional Indonesia	28
BAB IV PENGARUH PEMBENTUKAN TNI.....	32
A. TNI Alat Perjuangan Bangsa Indonesia	32
B. Rekonstruksi dan Rasionalisasi TNI	34
BAB V KESIMPULAN	38
DAFTAR PUSTAKA	41
LAMPIRAN.....	43



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR LAMPIRAN

SILABUS	43
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN	49

DAFTAR GAMBAR

Badan Keamanan Rakyat (BKR) pada saat pelatihan.....	66
Tentara Keamanan Rakyat (TKR)	66
Jenderal Soedirman	67
Letnan Jenderal Urip Sumoharjo	68
Markas TKR pertama di Gondokusuman Yogyakarta, saat ini menjadi museum Dharma Wiratama	69

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sewaktu Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, negara Indonesia belum mempunyai pemerintahan dan juga tentara. Segera sesudah proklamasi, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menyusun aparatur pemerintahan namun hampir tidak memperhatikan masalah pertahanan negara.

Pada saat yang sama, jutaan pemuda yang telah dilatih selama periode pendudukan Jepang tidak sabar menunggu untuk turut serta berperan. Namun setelah mereka menyadari bahwa kira-kira mereka tidak akan mendapatkan perintah atau mandat dari pemerintah yang sangat diharapkan, maka para pemuda itu mengambil prakarsa dan inisiatif sendiri untuk membentuk alat pertahanan bagi negara Republik Indonesia yang baru lahir.

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa para pemuda telah turun tangan untuk mengisi kekosongan suatu alat pertahanan dengan cara membentuk organisasi-organisasi perjuangan yang dikenal bernama "*lasykar*", namun mereka tidak memiliki senjata, tidak terlatih, tidak teratur, tidak berdisiplin dan tidak memiliki pimpinan yang berpengalaman. Selain itu, mereka seringkali berselisih paham dengan pemerintahan Soekarno dan tidak mau menerima perintah dari

pimpinan nasional yang tidak bersikap tegas dalam menentang pendaratan pasukan-pasukan Sekutu dan Belanda.¹

Oleh sebab itu, pemerintah harus menciptakan suatu pasukan bersenjata yang dapat membantu menegakkan kekuasaannya di dalam negeri. Pada prinsipnya sudah diakui perlunya sebuah tentara, mula-mula sesudah kemerdekaan bangsa diproklamasikan di dalam suatu keadaan di mana masih terdapat sekian banyak tentara Jepang di Indonesia dan dapat diperkirakan kedatangan tentara Sekutu dalam waktu dekat, maka akhirnya pemerintah merasa khawatir bahwa kemerdekaan itu akan ditumpas dan ditiadakan oleh orang-orang asing itu. Dalam rangka untuk mengamankan kemerdekaan yang sudah begitu lama kita idam-idamkan, dibentuklah Badan Keamanan Rakyat untuk mengorganisasi daya perlawanan Indonesia.² Dalam kabinet ada Kementerian Keamanan Rakyat, karena ada kemungkinan bahwa tentara pendukung Jepang akan berkeberatan, kemudian mengingat pihak Jepang secara resmi masih bertanggung jawab atas pemeliharaan ketertiban umum, Soekarno tidak mengangkat seorang Menteri Pertahanan.

Dalam perkembangannya kebutuhan akan persatuan sangat mendesak. Oleh karena itu PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 mengumumkan terbentuknya sebuah “*Badan Penolong Keluarga Korban Perang*” yang secara keorganisasian mencakup sebuah Badan Keamanan Rakyat (BKR). Di dalam undang-undang pembentukannya, fungsi BKR secara samar-samar disebutkan sebagai memelihara

¹Ulf Sundhaussen, *Politik Militer Indonesia 1945-1967 Menuju Dwi Fungsi ABRI*, Jakarta: LP3ES, 1986, hlm. 10.

²Sayidiman Suryohadiprojo, *Langkah-langkah Perjuangan Kita*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986, hlm. 1-2.

keamanan bersama-sama dengan rakyat dan badan-badan negara yang bersangkutan.

BKR dibentuk pada tanggal 22 Agustus 1945, sedangkan diumumkan bersama-sama dengan pembentukan KNI dan PNI pada tanggal 23 Agustus 1945. Di tiap-tiap karesidenan para bekas anggota tentara PETA dan *Heiho* secara aktif memimpin dan mengisi BKR dan tidak jarang mereka harus bertempur melawan pasukan Jepang, termasuk bekas pelatuhnya.

BKR dapat dikatakan tidak pernah digunakan sebagai alat untuk menghentikan berbagai kegiatan kaum pemuda yang tidak disetujui oleh pemerintah. Dalam waktu singkat BKR banyak dimasuki kalangan pemuda, terutama mantan anggota PETA (Pembela Tanah Air) dan kemudian juga para mantan anggota KNIL (*Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger*). Akan tetapi sebenarnya baik sifat maupun esensi BKR tidaklah memuaskan mereka yang bergabung didalamnya.³ Bahkan seandainya BKR diperintahkan untuk menumpas organisasi-organisasi yang tidak mau diatur, maka hal itu akan menimbulkan protes umum dari kelompok generasi muda kaum nasionalis. Hambatan paling besar bagi BKR untuk mencapai tingkat efisiensi militer yang lebih tinggi adalah tidak adanya sebuah komando terpusat yang dapat mengangkat anggota-anggota korps perwira. Seringkali kesatuan-kesatuan memilih komandan mereka sendiri sehingga akibatnya kedudukan komandan itu tidak lebih dari sebagai *primus inter pares* (yang pertama di antara sesama).

³Hendri Supriyatmono, *Nasution, Dwifungsi ABRI dan Kontribusi Ke Arah Reformasi Politik*, Yogyakarta, Yayasan Pustaka Nusantara, 1994, hlm. 14-15.

Walaupun secara resmi BKR adalah aparat untuk menjaga keamanan setempat, namun karena desakan situasi pada waktu itu, BKR memelopori usaha perebutan senjata dari tangan tentara Jepang. Badan-badan perjuangan di luar BKR pun melakukan hal yang sama. Dengan demikian Pemerintah Republik Indonesia merasa tiba waktunya, bahwa sebagai negara merdeka kita perlu mempunyai suatu tentara resmi, maka BKR diubah namanya menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). TKR bersifat organisasi tentara yang berjuang bersama rakyat. Oleh karena itu nama TKR ini mengandung arti bahwa tentara nasional ini adalah tentara rakyat, yang lahir dari rakyat dan untuk memberikan keamanan pada rakyat karena perjuangan waktu itu terjadi di daerah demi daerah maka sifat TKR banyak dipengaruhi keadaan daerah demi daerah. Organisasi Republik Indonesia yang muda berhasil menjadi semakin rapih, di Pulau Jawa dan Sumatra terasa kekuasaan negara baru itu, maka dirasa perlu untuk merubah nama tentara resmi dari Tentara Keamanan Rakyat melalui pergantian nama Tentara Keselamatan Rakyat menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI).⁴

Usaha untuk menyempurnakan tentara terus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia pada waktu itu. Banyaknya laskar-laskar dan badan perjuangan rakyat, kurang menguntungkan bagi perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Sering terjadi kesalahpahaman antara TRI dengan badan perjuangan rakyat yang lain.

Untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman tersebut pemerintah berusaha untuk menyatukan TRI dengan badan perjuangan yang lain. Pada 15 Mei 1947 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan penetapan tentang penyatuan TRI dengan

⁴Sayidiman Suryohadiprojo, *op.cit*, hlm. 4.

badan dan laskar perjuangan menjadi satu organisasi tentara. Pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden Soekarno meresmikan penyatuan TRI dengan laskar-laskar perjuangan menjadi satu wadah tentara nasional dengan nama Tentara Nasional Indonesia (TNI).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka dibuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses lahirnya Badan Keamanan Rakyat?
2. Bagaimana perkembangan Badan Keamanan Rakyat menjadi Tentara Nasional Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh pembentukan Tentara Nasional Indonesia?

C. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis proses lahirnya Badan Keamanan Rakyat.
2. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis perkembangan Badan Keamanan Rakyat menjadi Tentara Nasional Indonesia.
3. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis pengaruh pembentukan Tentara Nasional Indonesia.

D. Manfaat Penulisan

Hasil penulisan tentang “Perubahan Badan Keamanan Rakyat menjadi Tentara Nasional Indonesia dari tahun 1945-1948” ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain:

1. Bagi Sanata Dharma

Selain untuk melaksanakan salah satu Tri Dharma perguruan tinggi khususnya bidang ilmu pengetahuan sosial, makalah ini diharapkan dapat melengkapi dan memperkaya khasanah yang berguna bagi pembaca dan pemerhati sejarah di lingkungan Universitas Sanata Dharma.

2. Bagi Program Studi Pendidikan Sejarah

Untuk menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan dan memperkaya khasanah pengetahuan mengenai “Perubahan Badan Keamanan Rakyat menjadi Tentara Nasional Indonesia dari tahun 1945-1948”.

3. Bagi Penulis

Untuk menambah pengalaman dan pengetahuan dalam menulis karya ilmiah khususnya tentang “Perubahan Badan Keamanan Rakyat menjadi Tentara Nasional Indonesia tahun 1945-1948”.

4. Bagi Para Pembaca

Penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pembaca dan sebagai referensi dalam mengembangkan materi dari makalah ini.

E. Sistematika Penulisan

Dalam mengkaji tentang “Perubahan Badan Keamanan Rakyat menjadi Tentara Nasional Indonesia dari tahun 1945-1948” akan disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

- Bab I : Berupa pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan dan sistematika penulisan.
- Bab II : Bab ini menyajikan uraian tentang proses lahirnya Tentara Keamanan Rakyat.
- Bab III : Bab ini menyajikan uraian tentang perkembangan Badan Keamanan Rakyat menjadi Tentara Nasional Indonesia.
- Bab IV : Bab ini menyajikan pengaruh pembentukan Tentara Nasional Indonesia.
- Bab V : Bab ini menyajikan uraian kesimpulan dari permasalahan yang telah diuraikan pada Bab II, III dan IV.

BAB II

PROSES LAHIRNYA BADAN KEAMANAN RAKYAT (BKR)

A. Pembubaran Tentara PETA Berhubungan Dengan Pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR)

Tentara PETA lahir pada masa pendudukan Jepang dengan bantuan dari pihak Jepang. Para pemimpin Republik Indonesia ketika itu mengkhawatirkan bahwa PETA dapat dijuluki sebagai satuan tentara Jepang.¹PETA pada hakikatnya merupakan suatu organisasi ketentaraan yang lengkap dan komplit yang dipersiapkan pada masa damai maupun untuk masa perang. Susunan kesatuannya baik dari bawah sampai dengan level komandan batalyon adalah murni terdiri dari suku bangsa Indonesia asli yang pada waktu itu di bawah pemerintahan Jepang.²

Mental keprajuritan dan mental kebangsaannya tidak perlu diragukan lagi karena mereka pada umumnya sebagian besar terdiri dari orang-orang pilihan pada daerahnya berdasarkan aspek intelektualitas dan juga pengaruh terhadap masyarakat daerahnya masing-masing.³

Setelah Jepang kekuasaannya sirna karena kalah dalam Perang Pasifik melawan pihak Sekutu tanggal 15 Agustus 1945, Maka status hukumnya organisasi PETA tidak lagi terikat dengan Jepang. Prajurit PETA yang dibubarkan tanggal 19 Agustus 1945 langsung dipulangkan ke daerahnya masing-masing,

¹Pamoe Rahardjo, *Badan Keamanan Rakyat : Cikal Bakal TNI*, Jakarta : PETA PRESS, 1995, hlm. 266.

²*Ibid*, hlm. 213.

³Purbo S. Suwondo, *PETA : Tentara Sukarela Pembela Tanah Air di Jawa dan Sumatra 1942-1945*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 155.

padahal mereka itu merupakan tenaga militan yang terlatih dan memiliki semangat kebangsaan yang sangat tinggi.

Berdasarkan dikeluarkannya Dekrit Presiden RI tanggal 22 Agustus 1945 sebagai narasumber hukum berdirinya BKR, maka hal itu langsung digunakan untuk membentuk wadah organisasi perjuangan dalam mempertahankan proklamasi kemerdekaan yang telah dikumandangkan tanggal 17 Agustus 1945. Sekalipun sistem komunikasi dan koordinasi pada waktu itu masih sangat kuno (terbatas) dan juga sulit tetapi karena semangat yang sangat tinggi, maka segala keputusan-keputusan penting yang perlu diambil tidak terjadi penyimpangan dari pertimbangan pada umumnya.⁴

Militansi yang dimiliki mantan prajurit PETA mulai dahulu sampai sekarang baik itu dari tingkatan prajurit bintang maupun perwiranya tetaplah konstan, tidak luntur atau hilang karena dibubarkan. Itulah kaderisasi prajurit PETA yang menunjukkan pendidikan ksatria murni sehingga semangat militansi tetap terjaga dengan sangat baik.

B. Kronologi Terbentuknya Badan Keamanan Rakyat (BKR)

Keputusan pemimpin nasional untuk membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) dan bukannya suatu tentara yang sungguh-sungguh dipengaruhi oleh kekhawatiran bahwa Sekutu akan melakukan penghancuran terhadap Republik. Hal ini berdasarkan atas perkiraan bahwa pada saat itu mereka belum

⁴Pamoe Rahardjo, *loc.cit*, 266.

mempunyai cukup tenaga yang berketerampilan militer untuk mengadakan perlawanan.

Para pemimpin nasional memutuskan memakai strategi yang didasarkan atas diplomasi dan bukan konfrontasi. Mereka mempertimbangkan dengan mengambil sikap *low profile*, maka pihak Sekutu tidak akan terprovokasi oleh eksistensi Republik dan tidak akan bertindak represif. Gagasan *low profile* ini meliputi kebijakan untuk tidak membentuk tentara, melainkan hanya sebuah Badan Keamanan Rakyat (BKR).⁵Faktor-faktor Strategi dan Kebijakan tentang Pembentukan BKR.⁶

1. Tantangan Dalam Negeri

Pertimbangan Politis-Psikologis, para pemimpin Indonesia ingin menunjukkan pada dunia internasional bahwa apabila di kemudian hari sebuah organisasi ketentaraan akan didirikan, maka tentara itu bukanlah penerus organisasi paramiliter seperti PETA dan *Heihoyang* dibentuk Jepang untuk melawan Sekutu.⁷ Namun merupakan suatu organisasi tentara yang berasal dari para prajurit-prajurit Indonesia yang pernah mendapat pendidikan dan pelatihan saat menjadi anggota PETA atau pun anggota *Heiho* kemudian ada alasan lain. Pertama, dalam rangka perjuangan diplomasi memperoleh pengakuan kedaulatan RI pemerintah hendak menunjukkan kepada dunia, khususnya kepada Sekutu bahwa pemerintah RI menganut politik “cinta damai”. Kedua, pemerintah RI hendak menunjukkan kepada dunia, bahwa Republik Indonesia pimpinan

⁵Nugroho Notosusanto, *Tentara PETA Pada Jaman Pendudukan Jepang di Indonesia*, Jakarta : PT Gramedia, 1979. hlm. 141-142.

⁶Pamoe Rahardjo, *op.cit.* hlm. 265

⁷*Ibid*, hlm 266.

Soekarno-Hatta adalah bukan republik facis (militeristis) seperti yang dituduhkan oleh propaganda Belanda di luar negeri.⁸Pembentukan tentara akan mengundang reaksi dan pasukan-pasukan Jepang dan Sekutu yang akan mendarat di Indonesia, padahal kekuatan nasional diperkirakan belum mampu menghadapi kedua lawan.⁹

2. Tantangan Luar Negeri

- a. Mendapatkan pengakuan dari Sekutu terhadap keberadaan Indonesia sebagai Negara yang Merdeka dan Berdaulat. Hal ini dimaksudkan jangan sampai kemerdekaan Indonesia itu ditentang oleh pihak Sekutu.
- b. Mengakhiri secara sah kekuasaan Belanda atas Indonesia yang secara hukum Internasional masih diakui Sekutu sebagai wilayah jajahan Belanda. Persoalan ini timbul terutama karena proklamasi terjadi sesudah Jepang menyerah kepada Sekutu, sehingga semua wilayah yang dikuasai Jepang harus dikembalikan kepada Sekutu untuk selanjutnya dikembalikan kepada yang berhak.
- c. Menjadikan dunia Internasional sebagai sumber bagi kemakmuran bangsa Indonesia yang Merdeka. Pemikiran ini dilandasi keyakinan bahwa kemerdekaan hanyalah suatu awal bagi kehidupan bangsa yang adil dan makmur karena setelah proklamasi haruslah dirancang pola dasar kebijakan ekonomi luar negeri Indonesia.

⁸ Moehkardi, *Pendidikan Perwira TNI-AD di masa Revolusi*, Jakarta: PT. Inaltu, 1979, hlm. 26.

⁹ Imran Amrin dkk, *Sejarah Perkembangan Angkatan Darat*, Jakarta: Dephankam Pusat Sejarah Abri, hlm. 1.

C. Proses Lahirnya BKR

Sewaktu Jepang menyerah kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, terjadilah kevakuman kekuasaan di Indonesia, dalam kevakuman ini antara kelompok pemuda di Jakarta dengan Soekarno-Hatta ada perbedaan mengenai cara mereka hendak memproklamasikan kemerdekaan. Golongan muda tidak setuju dengan alasan golongan tua, golongan muda menganggap PPKI adalah badan bentukan Jepang. Mereka tidak menyetujui lahirnya proklamasi kemerdekaan, sebaliknya mereka berpendapat bahwa proklamasi harus dilahirkan dengan kekuatan sendiri lepas dari pemerintah Jepang.¹⁰

Kedua pendirian tersebut di pertemukan dalam rapat PPKI, akhirnya tanggal 17 Agustus 1945 beliau membacakan teks proklamasi hal tersebut di atas disambut oleh rakyat secara spontan dan penuh antusias. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.¹¹ Sebagai negara yang telah merdeka harus memiliki alat kelengkapan negara. Salah satu diantaranya adalah tentara sebagai alat pertahanan negara.

Pada 19 Agustus 1945, dua orang anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yaitu *Abikusno Tjokrosujoso* dan *Otto Iskandardinata*, dalam sidang pada hari itu mengusulkan pembentukan sebuah badan pembelaan negara. Usul tersebut ditolak dengan alasan memancing bentrokan dengan tentara pendudukan Jepang yang masih bersenjata lengkap dan adanya ancaman intervensi tentara Sekutu yang bertugas melucuti persenjataan tentara Jepang dan

¹⁰ Kardiya Wiharyanto, *Sejarah Indonesia dari Proklamasi Sampai Pemilu 2009*, Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2011, hlm. 16.

¹¹ Mohammad Hatta, *Legenda dan Realiteit Sekitar Proklamasi 17 Agustus*, Kumpulan Karangan IV, Jakarta: 1954, hlm. 283-284.

memulangkan mereka ke negerinya. Demikian usul untuk membentuk suatu tentara kebangsaan yang terdiri dari mantan prajurit PETA, *Heiho* dan Angkatan Laut ditanggihkan.¹²

Pada 20 Agustus 1945, dibentuklah Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP). BPKKP semula bernama Badan Pembantu Prajurit dan kemudian berubah menjadi Badan Pembantu Pembelaan yang keduanya disingkat BPP. Pembentukan BPP sudah ada dalam zaman Jepang dan bertugas memelihara kesejahteraan anggota tentara PETA dan *Heiho*.¹³ Setelah PETA dan *Heiho* dibubarkan oleh Jepang tanggal 18 Agustus 1945, maka tugas untuk menampung mantan anggota PETA dan *Heiho* ditangani oleh Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP).¹⁴

Seiring dengan itu didirikan pula Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang merupakan bagian dari BPKKP. Berita tentang pembentukan BPKKP dan BKR segera dimuat untuk dikomunikasikan dalam harian surat kabar *Soeara Asia* yang terbit pada 25 Agustus 1945. Di wilayah Jawa dan Sumatera, sebagai jawaban atas proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia maka muncullah berbagai badan perjuangan yang menamakan diri mereka barisan, pasukan atau pemuda.

Dalam sidang tanggal 22 Agustus 1945 yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta, PPKI menetapkan:¹⁵

- a. Badan Keamanan Rakyat memiliki tugas pemeliharaan keamanan bersama-sama dengan rakyat dan jawatan-jawatan negeri yang bersangkutan.

¹²Pamoe Rahardjo, *op.cit*, hlm. 157.

¹³Imran Amrin dkk, *op.cit*, hlm. 1.

¹⁴Jend. A. H. Nasution. *op. cit*, hlm. 114.

¹⁵Pamoe Rahardjo, *op. cit*, hlm. 67.

b. BKR merupakan suatu bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang.

Didirikan dari pusat sampai ke daerah-daerah.

c. Pekerjaannya harus dilakukan dengan sukarela.

Semula BKR dimaksudkan sebagai suatu bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP). Hal ini terlihat aneh, tetapi memang demikian kenyataannya.¹⁶ Adapun tugas dari BPKKP itu secara resmi berbunyi, “menjamin kepada rakyat yang menderita akibat peperangan berupa pertolongan dan bantuan dengan memelihara keselamatan dan keamanan”.

Pembentukan BKR adalah sebagai penampungan organisasi-organisasi pembelaan negara dalam wadah nasional. BKR bukan tentara, tetapi korps pejuang bersenjata yang bertugas menjamin keamanan umum, namun kenyataannya nanti, BKR ini telah berperan pula sebagai alat penegak kedaulatan dan pertahanan negara.

Anggota BKR mencakup bekas anggota PETA, *Heiho*, *Keisatsutai* (Polisi), *Seinendan*, *Keibodan*, KNIL dan laskar rakyat. Sebagai ketua umum BKR pusat ditunjuk Kaprawi, sedangkan Sutaklasana dan Latief Hendraningrat masing-masing sebagai ketua I dan II.¹⁷ Proses perwujudan BKR dipermudah dengan tindakan pemimpin tentara Jepang yang membubarkan tentara Pembela Tanah Air (PETA), yaitu tentara yang dalam masa pendudukan Jepang dibentuk oleh Jepang dan terdiri atas bangsa Indonesia. Pemuda-pemuda bekas anggota tentara PETA untuk sebagian besar mendaftarkan diri menjadi anggota BKR dan bekas-bekas Perwira PETA diangkat sebagai pemimpin-pemimpin BKR. Di

¹⁶*Ibid*, hlm. 264.

¹⁷Kardiyat Wiharyanto, *op.cit*, hlm 35.

samping PETA juga ada *Heiho*, yaitu orang-orang Indonesia yang direkrut Jepang dalam masa pendudukannya untuk memperkuat pasukan-pasukan Jepang. Meskipun orang-orang Indonesia itu dimasukkan dalam tentara Jepang, namun dalam kenyataannya mereka diperlakukan sebagai manusia setingkat lebih rendah dan karena itu tidak berperan sebagai *Heitaisan* atau prajurit Jepang yang sebenarnya. Setelah mendengar proklamasi Indonesia, banyak di antara *Heiho* meninggalkan tentara Jepang dan menggabungkan diri pada BKR.¹⁸

BKR akan ditempatkan di bawah pengarahan KNIP dan cabang-cabangnya akan dibentuk di semua tingkat pemerintahan yang lebih rendah, dibawah pengawasan cabang-cabang Komite Nasional Indonesia (KNI) di daerah. Pemuda-pemuda dengan berbagai latarbelakang masuk ke BKR. Korps perwira BKR dengan cepat merasa terikat kepada pemerintah dan disiplin mereka jauh lebih baik dibandingkan dengan organisasi-organisasi kelasykaran yang menolak untuk dilebur ke dalam BKR dan pada umumnya tetap bersikap enggan menerima perintah dari pemerintah.¹⁹

Presiden Soekarno menyatakan agar bekas anggota tentara PETA (Pembela Tanah Air), *Heiho* dan pemuda-pemuda lainnya untuk sementara waktu bekerja dalam BKR dan bersiap-siap untuk dipanggil sebagai prajurit tentara kebangsaan jika datang saatnya.²⁰ Harapan Presiden itu mendapat sambutan dengan baik. Dalam satu-dua minggu saja BKR-BKR di berbagai daerah terbentuk dan menjelma menjadi badan-badan revolusi yang memimpin perebutan kekuasaan setempat. Di tiap-tiap keresidenan para anggota bekas tentara PETA

¹⁸ Sayidiman Suryohadiprojo, *op.cit*, hlm. 2.

¹⁹ Ulf Sundhaussen, *op.cit*, hlm. 11.

²⁰ Nugroho Notosusanto, *Pejuang Dan Prajurit*, Jakarta: Sinar Harapan, 1984, hlm. 36.

dan *Heiho* secara aktif memimpin dan mengisi BKR dan tidak jarang mereka harus bertempur melawan pasukan Jepang termasuk bekas pelatuhnya. Pimpinan-pimpinan BKR juga menjadi anggota Komite Nasional Indonesia dan ikut serta di dalam memecahkan masalah-masalah politik, sosial-budaya dan militer yang timbul di dalamnya. Adapun pembentukan awal BKR sebagai berikut:

1. Jakarta

Para pemuda dan mantan prajurit PETA di Jakarta berkumpul dan menentukan struktur BKR sesuai dengan struktur teritorial zaman pendudukan Jepang. Mereka yang menyatakan diri sebagai pengurus pusat terdiri dari Kaprawi, Latief Hendraningrat, Arifin Abdurrahman, Machmud dan Zulkifli Lubis.

BKR Jakarta dibentuk pada bulan Agustus 1945 dipimpin oleh Moefreni Moekmin yang beranggotakan beberapa orang, antara lain Daan Mogot, Latief Hendraningrat, Soeroto Koento dan Sujono.

2. Bogor

BKR di Bogor terbentuk pada bulan Oktober 1945. Beberapa pengurus antara lain Husein Sastranegara, Toha dan Dulle Abdullah. Belum sempat mempersenjatai diri dengan kuat, BKR Bogor telah menghadapi penyerbuan tentara Inggris pada 22 Oktober 1945. Dalam perundingan dengan Inggris yang berlangsung di Jakarta, beberapa pimpinan BKR ditangkap pihak Inggris dan diasingkan ke Pulau Onrust.

3. Jawa Tengah dan Jawa Timur

Pembentukan BKR di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur memiliki pola yang sama dengan proses pembentukan BKR di Jakarta dan Jawa Barat. Pada mulanya terdapat inti mantan-mantan prajurit PETA kemudian menjadi pasukan dalam jumlah besar karena ikut sertanya para pemuda dari golongan lain seperti *Keibodan, Heihodan Seinendan*.

Telah diputuskan bahwa tugas BKR adalah “memelihara keamanan”, bersama-sama dengan rakyat dan jawatan-jawatan negara yang bersangkutan.²¹ Badan ini bukan dimaksudkan sebagai organisasi ketentaraan yang resmi. Dalam perkembangannya ternyata BKR ini mampu berperan dalam mempertahankan negara dalam memelopori pelucutan senjata terhadap tentara Jepang.

BKR suatu badan perjuangan tetapi akan ditingkatkan ke arah ketentaraan. Hal ini jelas tercermin dalam pidato Soekarno tanggal 23 Agustus 1945 yang berbunyi :

Saya mengharapkan kepada kamu sekalian, hai mantan prajurit-prajurit PETA, *Heiho*, Pelaut beserta pemuda-pemuda lain untuk sementara waktu masuklah dan bekerjalah dalam Badan Keamanan Rakyat. Percayalah, nanti akan datang saatnya kamu dipanggil untuk menjadi prajurit dalam Tentara Kebangsaan Indonesia!!²²

Isi amanat tersebut di atas merupakan sumber hukum lahirnya/ terbentuknya Tentara Keamanan Rakyat.

²¹ Hendri Supriyatmono, *Nasution, Dwifungsi ABRI Dan Kontribusi Ke Arah Reformasi Politik*, Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1994, hlm. 14.

²²Pamoe Rahardjo, *op.cit*, hlm. 199.

BAB III

PERKEMBANGAN BADAN KEAMANAN RAKYAT MENJADI TENTARA NASIONAL INDONESIA

A. Lahirnya Kekuatan Sosial-Politik Baru

Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, adalah sumber dari seluruh tatanan dan kehidupan politik bagi Indonesia sebagai negara baru. Sehari sesudah pernyataan kemerdekaan itu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mulai mengadakan tiga kali sidang untuk membicarakan hal-hal yang *urgens* sehubungan dengan telah berdirinya Republik Indonesia. Sidang tersebut yaitu:

1. Sidang pada tanggal 18 Agustus 1945, mengambil keputusan yang berupa: mengesahkan Undang-undang Dasar Negara (UUD 45) dan memilih presiden serta wakil presiden yang secara aklamasi terpilih ialah masing-masing Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta.
2. Sidang pada tanggal 19 Agustus 1945, dalam sidang ini Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan keputusan-keputusan: membentuk kabinet sebagai badan eksekutif dengan dua belas departemen yang masing-masing dikepalai oleh seorang menteri; pada saat itu pula ditunjuk orang-orangnya, kecuali jabatan menteri pertahanan yang masih dilowongkan untuk beberapa lama yang tidak ditentukan.
3. Sidang pada tanggal 22 Agustus 1945, berhasil membentuk Komite Nasional Indonesia (KNI) dengan ketuanya Mr. Kasman Singodimejo, yaitu bertugas

memberi nasihat kepada Presiden beserta anggota kabinetnya, kemudian Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada saat itu juga langsung meleburkan dan menjelmakan diri menjadi KNI pusat. KNI ini dibentuk dari pusat sampai ke daerah-daerah. Disamping itu, pada sidang ini diputuskan pula untuk membentuk Badan Penolong Keluarga Korban Perang yang mempunyai salah satu bagiannya yang bernama “Badan Keamanan Rakyat” (BKR) yang berada dibawah KNI. BKR ini juga dibentuk dari pusat sampai ke daerah-daerah.¹

Pemerintah mengeluarkan maklumat atau dekrit tentang pembentukan Badan Keamanan Rakyat. Seperti terbukti dari namanya yang dipilih, maka badan bersenjata yang dipilih dan didirikan itu adalah alat untuk menjamin keadaan di dalam negeri. BKR didirikan dalam hubungan siasat *all is running well*, Yakni siasat pemerintah yang didasarkan atas anggapan bahwa kita akan dapat memperjuangkan pengakuan secara *de jure* asal saja kita dapat membuktikan bahwa segala sesuatu berjalan beres di daerah kita.² Tugas dan status BKR adalah menjaga keamanan rakyat bersama-sama dengan jawatan-jawatan negeri yang bersangkutan. BKR dipimpin dan diawasi oleh Komite Nasional Indonesia (KNI) setempat. BKR adalah badan perjuangan rakyat dan bukan lembaga pemerintah.³

Pemimpin-pemimpin BKR juga menjadi anggota Komite Nasional Indonesia dan ikut serta didalamnya untuk memecahkan masalah-masalah politik,

¹ Yahya Muhaimin, *Perkembangan Militer Dalam Politik Di Indonesia 1945-1966*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1982 hlm. 21.

²T.B Simatupang, *Pelopor dalam Perang, Pelopor dalam Damai*, Jakarta:Sinar Harapan, 1981 hlm. 86.

³Aboe Bakar Loebis, *Kilas Balik Revolusi*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992 hlm. 101.

ekonomi, sosial-budaya dan militer yang timbul didaerahnya, sebab BKR bukanlah suatu tentara reguler melainkan suatu korps pejuang bersenjata. KNI dan BKR menjadi organisasi-organisasi rakyat yang tidak sekedar untuk membantu, melainkan untuk mendorong dan memimpin revolusi.⁴ Namun didalam hal ini, pemerintahan Soekarno-Hatta sendiri memang bermaksud agar BKR sekedar hanya untuk memelihara ketentraman setempat saja, sesuai dengan strategi politik Soekarno-Hatta yang amat menitikberatkan dan mementingkan segi diplomasi atau perundingan. Karena itu, sekalipun BKR telah berhasil menghimpun bekas-bekas tentara PETA, *Heiho* serta lain-lainnya dan BKR merupakan satu lambang pertahanan maksimal yang dapat dibentuk bila menilik keadaan dan kondisi-kondisi pada saat itu, namun adanya BKR itu tidak memberikan kepuasan kepada kalangan pemuda dan pejuang yang menitikberatkan pada semangat dan kekuatan senjata, yaitu terutama pada kalangan pemuda yang kemudian hari berkembang di dalam organisasi Tentara Nasional Indonesia.⁵

B. Lahirnya Tentara Reguler

Kebijakan pemerintah untuk menunda pembentukan tentara nasional, menyebabkan situasi keamanan bertambah gawat. Tindakan NICA (*Netherlands Indie Civil Administration*) yang membonceng tentara Sekutu menyebabkan terjadinya pertempuran-pertempuran dengan pemuda Indonesia, demikian juga antara pemuda Indonesia dengan tentara Jepang. Ditambah lagi dengan tindakan NICA yang melakukan teror di Jakarta sehingga banyak

⁴Nugroho Notosusanto, *Pejuang Dan Prajurit*, Jakarta: Sinar Harapan 1984, hlm. 37.

⁵Yahya Muhaimin, *op.cit*, hlm. 22.

menimbulkan korban dan situasi negara terancam. Perlawanan dan perebutan kekuasaan yang dilakukan secara spontan pada berbagai tempat tanpa adanya kesatuan komando terasa tidak efisien serta banyak memakan korban.⁶

Melihat perkembangan situasi yang semakin membahayakan negara, pemimpin negara rupanya menyadari bahwa sulit dan bahkan tidak mungkin untuk mempertahankan negara dan kemerdekaannya tanpa suatu Angkatan Perang, maka BKR yang awal mulanya mampu mempelopori pelucutan senjata sudah tidak cocok lagi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hal ini disebabkan tugas badan ini lebih bertitik berat pada perjuangan umum dan tidak untuk tugas-tugas pertahanan negara. Lagi pula BKR sangat otonom dan dibawah KNI-D, sehingga menyulitkan pemerintah pusat dalam memperhitungkan kekuatannya. Disamping itu dalam masa perebutan senjata banyak jatuh kedatangan pemuda yang bukan menjadi anggota BKR.

Menghadapi situasi negara yang semakin terancam keberadaannya, pemerintah RI mulai menyadari perlunya tentara untuk mempertahankan negara dari ancaman baik dalam maupun luar, terutama yang berusaha menghancurkan kemerdekaan RI. Pemerintah sadar bahwa untuk menjaga keamanan dan untuk mempertahankan negara Indonesia tidaklah cukup dengan BKR saja. Didalam saat-saat seperti itu, pemerintah memanggil bekas mayor KNIL Urip Sumoharjo ke Jakarta dan ditugaskan untuk membentuk tentara kebangsaan dengan beliau sendiri sebagai kepala stafnya.⁷ Dengan keputusan pemerintah untuk membentuk Tentara Keamanan Rakyat itu cocok sekali, karena adanya komando dari pusat,

⁶Nugroho Notosusanto, *op.cit*, hlm. 40.

⁷Yahya Muhaimin, *op.cit*, hlm. 24.

sedangkan pada BKR masih terpecah-pecah, adanya komando terpusat akan menciptakan kekompakan, kebersamaan dan kesatuan sehingga perjuangan dapat dipikul.⁸ Dengan demikian untuk pembentukan tentara sudah ada orang yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, maka pada tanggal 5 Oktober 1945 dikeluarkan oleh pemerintah suatu maklumat pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR).⁹ Maklumat tentang pembentukan TKR diumumkan oleh Presiden Soekarno melalui radio. Hal ini dimaksudkan agar segera diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia khususnya para pemuda. Bahkan mereka berlomba-lomba ingin masuk menjadi anggotanya,¹⁰ maklumat resmi yang mengantar kelahiran TKR berbunyi sebagai berikut:

Maklumat pemerintah

Untuk memperkuat perasaan keamanan umum,
maka diadakan satu Tentara Keamanan Rakyat.

Djakarta, 5 Oktober 1945
Presiden Republik Indonesia
Soekarno¹¹

Saat itulah yang dianggap kelahiran angkatan bersenjata reguler Republik Indonesia. Maklumat itu kemudian disusuli dengan pengumuman-pengumuman dari Markas Tertinggi yang dibentuk oleh Urip Sumoharjo. Diserukan oleh Markas Tertinggi agar para pemuda, para bekas prajurit PETA, *Heiho*, *Kaigun* dan barisan

⁸A. H. Nasution, *Tentara Nasional Indonesia*, jilid I, Djakarta: GANACO N.V, 1963, hlm. 126.

⁹G. Moedjanto, *Indonesia Abad 20, Dari Kebangkitan Nasional sampai Linggajati*, jilid I, Yogyakarta: Kanisius, 1988, hlm. 120.

¹⁰Dinas Sejarah Militer TNI-AD, *Seri Monumen Sejarah TNI-AD*, Jilid I, Jakarta: Dinas Sejarah, 1977, hlm. 120. Lihat juga A.H. Nasution, *Tentara Nasional Indonesia*, Cetakan ke-dua, Jilid I, Djakarta: Ngonaco N. V, hlm. 126.

¹¹A. H. Nasution, *op.cit*, hlm. 120.

pelopor dan lain-lainnya, memasuki TKR. Pada tanggal 20 Oktober 1945 oleh Kementerian Keamanan Rakyat diumumkan susunan pimpinan sebagai berikut:

- 1) Menteri Keamanan Rakyat *ad interim*; Moh. Suljoadikusumo
- 2) Pimpinan Tertinggi TKR: Supriyadi
- 3) Kepala Staf Umum: Oerip Soemohardjo (kemudian diangkat menjadi letnan Jenderal).¹²

Demikian pada tanggal 5 Oktober 1945 BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Sesuai dengan namanya, fungsi utama TKR masih tetap memelihara keamanan dalam negeri dan bukan menghadapi musuh dari luar namun demikian, setidak-tidaknya statusnya sudah ditingkatkan menjadi tentara. Dengan menggunakan nama baru itu, dari segi struktur ia mengalami perbaikan. Untuk sebagian besar hal itu dimungkinkan berkat adanya perwira-perwira didikan Belanda yang masuk BKR. Sementara para bekas opsir PETA tidak pernah mendapat pendidikan staf, para bekas opsir KNIL itu setidaknya telah berpengalaman sekedarnya dalam melakukan tugas-tugas staf dan oleh sebab itu mereka lebih memenuhi persyaratan untuk tugas yang berkaitan dengan pengorganisasian dan perencanaan militer.¹³

Maksud dan tujuan dibentuknya TKR adalah seperti dijelaskan oleh Balai Penerangan Markas Tertinggi Tentara Keamanan Rakyat saat lahirnya tanggal 5 Oktober 1945, yang antara lain mengatakan bahwa TKR tidaklah dijadikan alat dalam melakukan perampasan hak-hak orang lain, tidak digunakan untuk melakukan angkara murka, tetapi di bentuk menjamin keamanan dan ketentraman

¹²Nugroho Notosusanto, *op.cit*, hlm. 41.

¹³Ulf Sundhaussen, *Politik Militer Indonesia 1945-1967 Menuju Dwi Fungsi ABRI*, Jakarta: LP3ES, 1986, hlm. 13.

negara. Disini rakyat harus merasa dilindungi dan dibela kehidupannya. TKR bukanlah suatu tentara yang menindas rakyat, tetapi sebaliknya, ia merupakan sebuah sarana yang juga membangkitkan semangat rakyat guna pembangunan negara Republik Indonesia.¹⁴

Terbentuknya Tentara Keamanan Rakyat merupakan langkah baru dari pembangunan tentara nasional, Badan Keamanan Rakyat sebagai embrionya menjelma menjadi Tentara Keamanan Rakyat. Perubahan telah terjadi dalam sejarah Indonesia. Kebijakan pemerintah untuk tidak segera membentuk sebuah tentara akhirnya berubah dan dirasakan perlunya segera membentuk tentara guna menyelamatkan negara. Untuk itulah pemerintah mengeluarkan maklumat tentang pembentukan Tentara Keamanan Rakyat.

TKR bersifat organisasi tentara yang berjuang bersama rakyat dan oleh karena perjuangan kemerdekaan waktu itu terjadi di daerah demi daerah maka sifat TKR banyak dipengaruhi oleh keadaan daerah demi daerah. Sifat inilah yang merata di semua TKR dan ia menjadi motor perjuangannya, tiadanya persenjataan dan peralatan tidak menjadi halangan untuk melawan pihak-pihak yang menindas kemerdekaan kita dan contoh yang paling jelas adalah perlawanan rakyat di Surabaya terhadap Inggris yang menghendaki penguasaan terhadap kota pada 10 November 1945 kemudian pada tanggal itu kita peringati sebagai Hari Pahlawan.¹⁵

Pembentukan TKR ini segera diikuti oleh pemerintah mobilisasi TKR yang dikeluarkan oleh KNIP, sebagai organisasi yang membawahi BKR, pada

¹⁴Ruslan Abdulgani, *Indonesia Menatap Masa Depan*, Jakarta: Pustaka Merdeka, 1987, hlm.359.

¹⁵Sayidiman Suryohadiprojo, *Langkah-langkah Perjuangan Kita*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986, hlm. 1.

tanggal 9 Oktober yaitu untuk lebih menyatukan bekas-bekas tentara PETA, KNIL, *Heiho*, laskar-laskar, serta barisan rakyat lainnya. Lima hari kemudian 14 Oktober keluar sebuah Maklumat dari para bekas opsir-opsir tentara Hindia-Belanda (KNIL) yang menyatakan kesanggupan lahir batinnya untuk memperkuat Republik Indonesia.¹⁶

Dalam sidang kabinet tanggal 15 Oktober 1945, ditetapkan Urip Sumoharjo untuk memangku jabatan sebagai Kepala Staf Umum TKR dengan pangkat Letnan Jenderal, dengan tugas pertama membentuk Markas Besar Tertinggi TKR, beberapa nama kota semula dicalonkan sebagai tempat kedudukan Markas Besar Tertinggi (MBT) TKR yaitu di Purwokerto, Purwakarta, Magelang dan Yogyakarta, akhirnya Letnan Urip Sumoharjo memilih Yogyakarta. Bersama rombongan pemimpin BKR pusat dan sejumlah perwira KNIL, Urip Sumoharjo berangkat ke Yogyakarta untuk membentuk MBT TKR. MBT TKR pertama menempati salah satu ruangan di Hotel Tugu, Yogyakarta, kemudian pindah ke jalan Gondokusuman, di gedung yang sekarang menjadi markas Korem 72, di Yogyakarta. Digatedung inilah Letjen Urip Sumoharjo bersama stafnya memulai tugas utamanya untuk menyusun TKR.¹⁷

Sementara itu timbul problem bagi Letjen Urip, Supriyadi yang ditunjuk menjadi pimpinan Tertinggi TKR ternyata tak kunjung tiba sampai satu bulan lebih, hal ini tidak bisa dibiarkan terus menerus, karena itu Letjen Urip lalu memprakarsai mengadakan konferensi TKR di Yogyakarta guna memilih seorang calon Panglima Besar TKR. Untuk itu para panglima divisi TKR beserta para

¹⁶Yahya Muhaimin, *op.cit*, hlm. 24.

¹⁷Moehkardi, *Pendidikan Perwira TNI-AD di masa Revolusi*, Jakarta: PT. Inaltu, 1979, hlm. 31.

komandan resimen TKR di Jawa lalu diundang berkonferensi di Yogyakarta.

Pada tanggal 18 Desember 1945, pemerintah RI akhirnya menetapkan Kol. Sudirman menjadi Panglima Besar TKR dengan pangkat Jenderal.¹⁸Tindakan selanjutnya MT-TKR adalah mengeluarkan pengumuman, intruksi-intruksi dan mengadakan koordinasi dengan departemen-departemen lain. Sementara di daerah-daerah telah tersusun secara spontan divinisi-divinisi TKR melebihi jumlah yang direncanakan. Sebenarnya Kepala Staf Umum TKR Letnan Jenderal Urip Sumoharjo merencanakan akan mendirikan empat divisi saja, yakni tiga divisi di Jawa dan satu divisi di Sumatera. Tetapi rencana ini tidak terlaksana karena didahului oleh terbentuknya TKR di daerah secara spontan, sebagai hasil leburan BKR dan beberapa badan pejuang bersenjata yang telah ada. Akibatnya di Jawa saja kemudian terbentuk 10 divisi TKR sedang di Sumatera terbentuk 6 divisi, jumlah divisi TKR yang sebesar itu tidaklah sebagai suatu divisi tentara yang lazim. Divisi TKR yang benar-benar lengkap persenjataannya yang lengkap hanyalah Divisi VIII di Malang dan Divisi V di Purwokerto. Selebihnya suatu pasukan TKR dianggap sudah lumayan bila memiliki persenjataan 5 : 1, artinya 1 senjata untuk 5 orang.

Di Sumatera umumnya prajurit-prajurit TKR berasal dari Bagian Pemuda Republik Indonesia (BPRI) dan Pemuda Indonesia (PI). Dari kenyataan-kenyataan itu jelaslah, bahwa TKR adalah suatu tentara yang dibentuk dari bawah oleh pejuang-pejuang yang telah selama sebulan lebih menegakkan kedaulatan Republik Indonesia karena itu anggota-anggotanya merasa dirinya pertama

¹⁸*Ibid*, hlm. 32.

kalinya adalah pejuang dan baru kedua kalinya menjadi militer. Perasaan dirinya sebagai pejuang tidaklah berubah setelah memperoleh status militer profesional.

Kenyataan ini memang merupakan akibat logis dari pada situasi waktu itu. Pada waktu organisasi tentara mulai disusun pasukan, pasukan Sekutu telah menduduki beberapa kota besar dengan kekuatan tiga divisi tentara Inggris, dua divisi tentara Australia dan beberapa batalion tentara Belanda. Tekat para pemuda itu adalah satu, yakni berjuang membela negaranya yang sedang terancam oleh musuh. Untuk mengatasi situasi yang kemungkinannya akan kacau datangnya musuh, maka pemimpin TKR mengeluarkan suatu petunjuk bagi anggotanya untuk menduduki jabatan polisi dan pamong praja guna menjamin keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Isi petunjuk adalah: ditempat-tempat dimana pamong praja sudah meninggalkan tempat atau hilang, mereka segera diganti TKR yang sesuai dengan tingkat dan pangkatnya, misalnya: kepala desa diganti komandan regu, camat diganti oleh komandan seksi (peleton), wedana diganti oleh komandan kompi dan bupati diganti oleh komandan batalion.¹⁹

Para anggota TKR juga duduk dalam badan pekerja komite nasional pusat dan daerah, sebagaimana yang terjadi di Surabaya. Dalam badan ini anggota-anggotanya berasal dari berbagai golongan. Badan Pekerja (BP) KNI Surabaya meliputi delapan golongan yaitu anggota KNI, pemuda, buruh, pedagang, polisi, TKR, partai Islam dan petani. Kiranya ini merupakan awal dari kekaryaan ABRI dan penetapan karyawan ABRI dalam badan legislatif. Mengakui kenyataan yang ada, maka MT-TKR mengesahkan susunan sepuluh divisi di Jawa dan enam divisi

¹⁹Nugroho Notosusanto, *op.cit*, hlm. 42.

di Sumatera. Untuk menetapkan organisasi, sepuluh divisi yang ada di Jawa kemudian dibagi menjadi tiga, komandemen masing-masing dipimpin oleh seorang mayor Jenderal. Pembentukan komandemen-komandemen ini tidak begitu lancar, karena sebagian divisi-divisi tidak mau mengakui panglima komandemennya.²⁰

C. Terbentuknya Tentara Nasional Indonesia

Tentara Indonesia lahir, bukan dibentuk oleh pemerintah, akan tetapi lahir karena tuntutan perjuangan. Mereka membentuk dan mempersenjatai dirinya dan mengadakan koordinasi berintikan tenaga-tenaga muda yang telah mendapatkan latihan dan senjata dari Jepang. Karena dalam pembentukan tentara terjadi pada masa revolusi, maka dalam perjalanannya selalu mengalami perubahan. TKR yang berdiri pada tanggal 5 Oktober 1945 dirubah namanya menjadi TRI (Tentara Republik Indonesia) pada tanggal 25 Januari 1946.

Pada tanggal 23 Februari 1946 dikeluarkan penetapan Presiden untuk membentuk Panitia Penyelenggaraan Organisasi Tentara. Panitia besar reorganisasi ini beranggotakan sebelas orang dipimpin oleh Letnan Jenderal Urip Sumoharjo hasil kerja panitia besar penyelenggaraan organisasi diumumkan pada tanggal 17 Mei 1946 yang meliputi:

1. Organisasi Markas Besar TRI dengan pejabat-pejabatnya sebagai berikut:
Panglima Besar Jenderal R. Soedirman kepala markas besar umum Letnan Jenderal Urip Sumoharjo. Panglima besar membawahi divisi-divisi TRI.

²⁰*Ibid*, hlm 42

Jumlah divisi TRI yang semula sepuluh divisi diperkecil menjadi tujuh divisi dan tiga brigade di Jawa Barat serta tiga divisi di Sumatera.

2. Di Kementerian Pertahanan dibentuk Direktorat Jenderal Bagian Militer, dibawah pimpinan seorang direktur Jenderal, Mayor Jenderal Sudibejo.
3. Badan perjuangan dan laskar-laskar yang tidak mau menggabungkan diri pada TRI, TRI diberi wadah satu biro tersendiri dalam Kementerian Pertahanan yang diberi nama Biro Perjuangan. Mereka menganggap setiap warga negara berhak untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Bahkan mereka berpendapat bahwa laskar lebih berhak hidup karena langsung bersumber pada rakyat, sementara TKR dinilainya hanya menjadi alat pemerintah (negara) yang dikendalikan oleh sejumlah partai tertentu.²¹

Situasi tersebut menyebabkan terjadi kesulitan karena tindakan laskar yang mengambil inisiatif sendiri di luar kontrol pusat. Karena itu sistem desentralisasi terpaksa diadakan. Untuk mengantisipasi agar pertentangan itu tidak berlanjut, maka Presiden Soekarno sebagai Panglima Tertinggi mengeluarkan dekrit pada tanggal 5 Mei 1947 untuk membentuk TNI yang berisi sebagai berikut:

Karena situasi dan kondisi, maka dengan ini diinstruksikan untuk mempersatukan TRI dan laskar-laskar menjadi TNI, yang pelaksanaannya diserahkan kepada sebuah panitia yang diketahui oleh Panglima Tertinggi dengan memasukkan ke dalamnya berbagai badan, baik resmi maupun tidak resmi yang ada sangkut pautnya dengan pembelaan negara.²²

Dengan kerja keras antara pemerintah dan pihak militer, maka terbentuklah TNI di mana laskar-laskar dan badan perjuangan melebur di dalamnya. Sehubungan dengan itu juga TNI menggunakan sistem sentralisasi

²¹G. Moedjanto, *op.cit*, hlm. 122.

²²*Ibid*, hlm. 122.

untuk memudahkan pengontrolan. Kekuatan militer inilah yang berperan dalam upaya mempertahankan kedaulatan RI.

Adanya dua macam bala bersenjata, yaitu TRI sebagai tentara reguler disatu pihak dan badan perjuangan dilain pihak sangat tidak menguntungkan perjuangan. Banyak laskar yang berhaluan sesuai dengan politik partai dimana ia bernaung. Hal ini disadari oleh pemerintah yang berusaha sekuat tenaga untuk mempersatukan kedua bala bersenjata ini. Setelah usaha yang sulit pada tanggal 7 Juni 1947 Presiden mengeluarkan penetapan Presiden yang isinya antara lain:

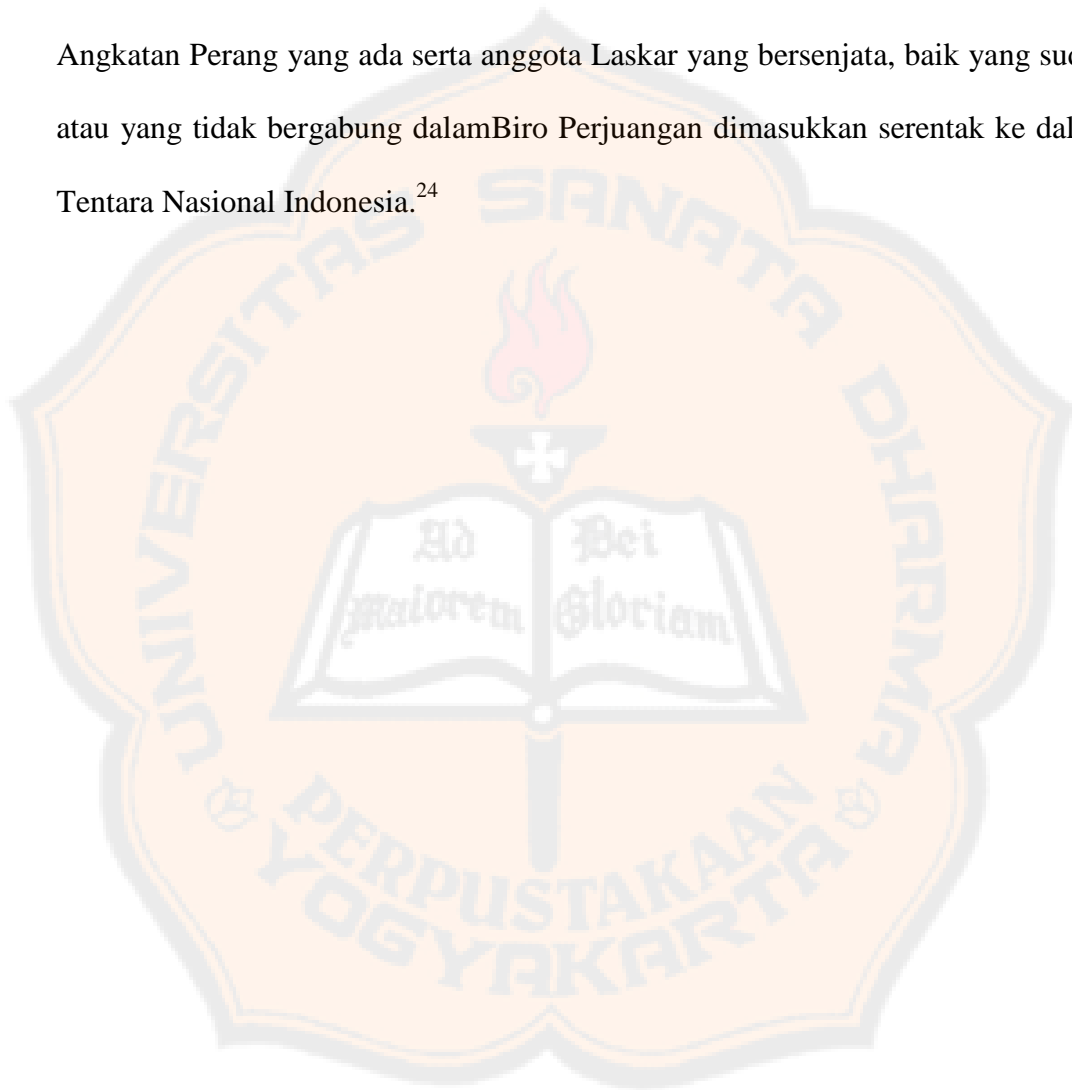
1. Mulai tanggal 3 Juni 1947 disahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan dinyatakan semua laskar serta badan perjuangan secara serentak dimasukkan kedalam TNI.
2. Pemimpin TNI dipegang oleh pucuk pimpinan TNI yang merupakan pimpinan kolektif yang terdiri atas kepala dan anggotanya. Kepala pucuk pimpinan: Panglima Besar Angkatan Perang atau Jenderal Soedirman. Anggota-anggota: Letnan Jenderal Urip Sumoharjo, Laksamana Muda M. Nasir, Komandor Muda S. Suryadarma, Suetomo atau Bung Tomo, Ir. Sakirman dan Joko Sujono. Tugas pucuk pimpinan adalah melaksanakan tugas operasional dan menyempurnakan organisasi.²³

Pada tanggal 9 April 1946 dibentuk TNI Angkatan Udara (tanggal 9 April diperingati sebagai Hari Penerbangan Nasional) dengan KASAU pertama Komodor Udara Soerjadarma, kepolisian Negara didirikan tanggal 1 Juli 1946 dengan Soekanto sebagai Kapolri pertama (tanggal 1 Juli ditetapkan sebagai Hari

²³Nugroho Notosusanto, *op.cit*, hlm. 42-44.

Bhayangkara, kemudian TNI AL (ALRI) didirikan pada tanggal 19 Juli 1946 di lawang, Jawa Timur, dengan panglima pertama Laksamana Muda M. Nazir.

Di dalam penetapan itu antara lain diputuskan, bahwa mulai tanggal 3 Juni 1947 dengan resmi berdiri Tentara Nasional Indonesia dan segenap anggota Angkatan Perang yang ada serta anggota Laskar yang bersenjata, baik yang sudah atau yang tidak bergabung dalam Biro Perjuangan dimasukkan serentak ke dalam Tentara Nasional Indonesia.²⁴



²⁴Yahya Muhaimin, *op.cit*, hlm. 28.

BAB IV

PENGARUH PEMBENTUKAN TNI

A. TNI Alat Perjuangan Bangsa Indonesia

Setelah proklamasi kemerdekaan RI tidak segera membentuk tentara tetapi membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR). Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 1945, BKR menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dan untuk memperbaiki susunan yang sesuai dengan dasar militer internasional, diubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI).

Dalam perkembangan selanjutnya usaha pemerintah untuk menyempurnakan tentara kebangsaan terus berjalan, seraya bertempur dan berjuang untuk tegaknya kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Untuk mempersatukan dua kekuatan bersenjata yaitu TRI sebagai tentara reguler dan badan-badan perjuangan rakyat, maka pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden Soekarno mengesahkan dengan resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Dengan adanya pengaruh pembentukan TNI, berarti pemerintah berhasil menyatukan seluruh laskar-laskar perjuangan sehingga menjadi satu komando (panglima). Ini berarti bahwa TNI berasal dari tiga elemen pokok atau tiga unsur pokok yang masing-masing memiliki karakteristik yang berlain-lainan dan bahkan sifat yang heterogen, yaitu bekas-bekas tentara KNIL, PETA dan Laskar.¹

¹Yahya Muhaimin, *Perkembangan Militer Dalam Politik Di Indonesia 1945-1966*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1971 hlm. 33.

Pada saat-saat kritis selama Perang Kemerdekaan (1945-1949), TNI berhasil mewujudkan dirinya sebagai tentara rakyat, tentara revolusi dan tentara nasional. Sebagai kekuatan yang baru lahir, TNI tidak hanya menata dirinya, pada waktu yang bersamaan harus pula menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dari dalam negeri, TNI menghadapi rongrongan-rongrongan baik yang berdimensi politik maupun dimensi militer. Rongrongan politik bersumber dari golongan Komunis yang ingin menempatkan TNI dibawah pengaruh mereka melalui Pepolit, Biro Perjuangan dan TNI-Masyarakat, adapun yang lainnya tantangan dari dalam negeri yang berdimensi militer yaitu TNI menghadapi pergolakan bersenjata di beberapa daerah dan pemberontakan PKI di Madiun serta Darul Islam (DI) di Jawa Barat sebuah organisasi orang Islam militan, yang bermaksud membentuk negara Islam Indonesia, hal ini dapat mengancam integritas nasional. Tantangan dari luar negeri yaitu TNI dua kali menghadapi Agresi Militer Belanda yang memiliki organisasi dan persenjataan yang lebih modern dari pada yang terdahulunya. Sadar akan keterbatasan TNI dalam menghadapi agresi Belanda, maka bangsa Indonesia melaksanakan Perang Rakyat Semesta dimana segenap kekuatan TNI dan masyarakat serta sumber daya nasional dikerahkan untuk menghadapi agresi tersebut, dan perlawanan ini merupakan kesadaran, tekad, sikap dan pandangan seluruh rakyat Indonesia untuk menangkal, mencegah menggagalkan dan menumpas setiap ancaman yang membahayakan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, integritas dan eksistensi Negara

Kesatuan Republik Indonesia telah dapat dipertahankan oleh kekuatan TNI bersama rakyat.²

B. Rekonstruksi dan Rasionalisasi TNI

Pada masa Kabinet dilaksanakan program rekontruksi dan rasionalisasi (rela).³ Dalam kaitannya dengan tentara, tujuan dasar kebijakan rekontruksi dan rasionalisasi itu adalah untuk menciutkan jumlah personil angkatan bersenjata, meningkatkan efesiensinya dan menempatkan kembali di bawah pimpinan pemerintah. Tujuan yang disebut paling akhir itu sangat penting, karena kesatuan-kesatuan tempur ketika itu sudah mulai menguasai daerah-daerah *front* dan mereka sendiri yang menempuh kebijakan masing-masing.⁴ Adapun Panglima Besar Jenderal Soedirman berusaha keras untuk mencegah politisasi tentara oleh berbagai kekuatan politik dari luar dan sebagainya membina tentara supaya kompak dan mempunyai pendirian politik sendiri. TNI adalah tentara yang lahir dari kancah perjuangan kemerdekaan yang tumbuh dari persiapan-persiapan perebutan kekuasaan dan usaha dalam mempertahankan kemerdekaan.⁵

Ketika TNI sedang berbenah, Belanda membuka Agresi pertamanya pada 21 Juli 1947. Hal tersebut langsung mendapatkan respon dari berbagai pihak yaitu pemerintah India dan Australia, kedua negara ini meminta agar masalah Indonesia segera dibicarakan dalam acara rapat dewan keamanan. Akhirnya terbentuklah

²[http://www.tni.mil.id/pages-10-sejarah-tni.html/2014/7/Sejarah TNI.html](http://www.tni.mil.id/pages-10-sejarah-tni.html/2014/7/Sejarah%20TNI.html).

³Nugroho Notosusanto, *Pejuang Dan Prajurit*, Jakarta: Sinar Harapan, 1984, hlm.47-48 .

⁴ Ulf Sundhaussen, *Politik Militer Indonesia 1945-1967 Menuju Dwi Fungsi ABRI*, Jakarta: LP3ES, 1986, hlm. 63.

⁵Museum Angkatan Darat Dinas Sejarah Angkatan Darat, *Buku Penuntun Musium Angkatan Darat*, Jogjakarta: Jajasan Bina Mental Pendidikan Kesedjahteraan,1971, hlm. 120.

Komisi Tiga Negara (KTN) yang difungsikan untuk menjembatani antara Belanda dan Indonesia, saat inilah peran TNI yang merupakan wajah baru TKR mulai menjalankan tugasnya sebagai Tentara Nasional Indonesia. Meskipun akhirnya dalam waktu singkat Belanda dapat menerobos garis pertahanan TNI, hal ini sangat wajar terjadi mengingat kekuatan TNI yang dilihat dengan organisasi dan peralatannya masih tertinggal jauh dengan Belanda yang serba canggih.

TNI sebagai badan pertahanan negara akhirnya dapat dilihat keberadaannya. Selain menghadapi agresi militer pada 1947, TNI juga mendapat tugas yang dapat dibilang berat karena disamping bangsa Asing ternyata didalam negeri juga mulai timbul aksi-aksi dari beberapa golongan yaitu beberapa pemberontakan yang dilakukan oleh komunis (PKI) yang pada saat itu legalitasnya diakui. Proses pemberontakan berlangsung, sejak masuknya Amir Syarifuddin sebagai Menteri Pertahanan. Ia melakukan banyak manipulasi dengan pepolit, Biro perjuangan dan TNI masyarakat. Hal tersebut ia lakukan dengan alasan untuk menjembatani antara tentara dan rakyat, akhirnya banyak yang menyoroti terutama PNI dan Masyumi apalagi tentang TNI bagian masyarakat yang ternyata merupakan organisasi politik sehingga banyak pihak yang menginginkan organisasi tersebut untuk dibubarkan.

Setelah kabinet Amir Syarifuddin jatuh maka kabinet baru yang terbentuk adalah kabinet Hatta. Akan tetapi dalam kabinet inipun juga mendapat intervensi dari Amir Syarifuddin, yaitu dengan membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR). FDR ini menuntut agar kabinet Hatta dibubarkan dan diganti dengan kabinet Parleментар, tetapi kabinet Hatta yang dibentuk pada 31 Januari 1948 ini dapat

bertahan. Kemudian FDR melakukan pemogokan yang dilakukan di Delanggu dan beberapa kekacauan yang terjadi di Solo. Selanjutnya para buruh PKI (SOBSI) menyerang sektor perekonomian Indonesia dengan melakukan mogok kerja. Setelah terjadi pemberontakan PKI, banyak anggota TNI yang menjadi korban penculikan.

Pemberontakan di Solo tidak dapat ditangani secara maksimal oleh TNI. Akibatnya pemberontakan meluas dan muncul tokoh PKI, yakni Musso (salah seorang komunis yang telah lama tinggal Uni Soviet). Ia memanfaatkan anggota pemberontakan di Madiun pada 18 September 1948, anggota TNI banyak yang menjadi korban. Tanggal 19 September 1948 kabinet Hatta akhirnya memutuskan untuk menghadapinya dengan kekuatan senjata. Akhirnya, TNI dapat mengatasi hal tersebut dan pada 31 Oktober 1948, Musso tewas dalam baku tembak di desa Semanding.⁶

Berkat pengalaman menghadapi Belanda maupun pemberontakan-pemberontakan TNI semakin sadar akan aspirasi-aspirasi rakyat, yaitu bahwa kemerdekaan bangsa harus menjadi jalan utama untuk realisasi kehidupan yang lebih sejahtera, adil dan makmur. TNI tidak lain bertujuan untuk mengamankan agar aspirasi-aspirasi rakyat betul-betul dapat terwujud, yaitu bahwa kemerdekaan negara dan bangsa tetap terpelihara, bahwa kemerdekaan ini mendatangkan kehidupan yang lebih sejahtera dan merata, adil dan makmur bagi seluruh rakyat, dan bahwa ini semua terjadi dalam sinar filsafah bangsa kita pancasila.⁷

⁶<http://umaam.blogspot.com/2012/05/peran-serta-bkr-dan-tkr.html>.

⁷Sayidiman Suryohadiprojo, *Langkah-langkah Perjuangan Kita*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986, hlm. 7-8.

TNI terdiri dari sebagian besar anak-anak rakyat dari desa-desa dan selain dari itu TNI selama bertahun-tahun bergerak di desa-desa baik sebagai gerilya melawan penjajah maupun mengatasi masalah-masalah keamanan. Hidup di antara rakyat di desa telah mempertajam intuisi para pemimpin TNI tentang filsafah Pancasila. TNI menjadi alat negara yang mampu mempertahankan kemerdekaan RI sampai saat ini.



BAB V

KESIMPULAN

Dalam pembahasan permasalahan Perubahan Badan Keamanan Rakyat menjadi Tentara Nasional Indonesia dari Tahun 1945-1948 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses lahirnya Badan Keamanan Rakyat (BKR), Semula BKR dimaksudkan sebagai suatu bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP). BKR bukan tentara, tetapi korps pejuang bersenjata yang bertugas menjamin keamanan umum, namun kenyataannya nanti BKR ini telah berperan pula sebagai alat penegak kedaulatan dan pertahanan negara. Adapun yang melatarbelakangi kebijakan dibentuknya BKR yaitu adanya tantangan dari dalam dan luar negeri. Tantangan dari dalam negeri pertimbangan yang bersifat politis dan psikologis yang melatarbelakangi kebijakan tidak segera dibentuk tentara setelah proklamasi kemerdekaan. Pertama, dalam rangka perjuangan diplomasi memperoleh pengakuan kedaulatan RI pemerintah hendak menunjukkan kepada dunia, khususnya kepada sekutu bahwa pemerintah RI menganut politik “cinta damai”. Kedua, pemerintah RI hendak menunjukkan kepada dunia, bahwa Republik Indonesia pimpinan Soekarno-Hatta adalah bukan republik facis (militeristis) seperti yang dituduhkan oleh propaganda Belanda di luar negeri. Sedangkan tantangan dari luar negeri Indonesia haruslah mendapatkan pengakuan dari sekutu terhadap keberadaan Indonesia sebagai Negara yang Merdeka dan Berdaulat dan mengakhiri

secara sah kekuasaan Belanda atas Indonesia, menjadikan dunia Internasional sebagai sumber bagi kemakmuran bangsa Indonesia yang Merdeka. Didalam undang-undang pembentukan BKR, fungsi BKR disebutkan sebagai memelihara bersama-sama dengan rakyat dan badan-badan negara yang bersangkutan, BKR akan ditempatkan di bawah pengarahannya KNIP dan cabang-cabangnya akan dibentuk di semua tingkat pemerintahan yang lebih rendah, di bawah pengawasan cabang-cabang Komite Nasional Indonesia (KNI) di daerah. BKR dibentuk berdasarkan keputusan sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945.

2. Perkembangan BKR menjadi TNI memiliki perjalanan yang panjang, pada pemerintahan Soekarno-Hatta memang memaksudkan BKR sekedar hanya untuk memelihara ketentraman setempat sesuai dengan strategi Soekarno-Hatta yang amat menitikberatkan dan mementingkan segi diplomasi (perundingan). Pemerintah mulai merasa bahwa perlu adanya alat negara yang resmi maka dibentuklah TKR, maklumat tentang pembentukan TKR diumumkan oleh Presiden Soekarno melalui radio. Hal ini dimaksudkan agar segera diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia khususnya para pemuda. Sikap mereka yang mendukung kebijakan tersebut kemudian diwujudkan dengan para pemuda-pemuda mendaftarkan diri untuk menjadi anggota TKR dengan tanpa paksaan karena mereka telah muak terhadap setiap bentuk penjajahan dalam pendudukan Jepang dan hanya ingin hidup dalam Kemerdekaan. Untuk memperbaiki susunan dasar dan bentuk ketentaraan yang lebih sempurna maka TKR diubah namanya menjadi TRI. Pada tanggal 7 Juni 1947, keluar

sebuah Penetapan Presiden yang membentuk satu organisasi tentara bernama “Tentara Nasional Indonesia”, di mana semua laskar-laskar perjuangan dan TRI masuk menjadi anggotanya.

3. Pembentukan TNI berhasil menyatukan seluruh laskar perjuangan sehingga menjadi satu komando (panglima). Di samping itu kualitas alat negara semakin meningkat. Hal ini disebabkan untuk menjadi tentara dibutuhkan syarat-syarat tertentu, sehingga anggota laskar yang tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada masyarakat, akhirnya RI memiliki tentara yang handal. Apalagi TNI berasal dari rakyat, oleh rakyat dan bersama rakyat sanggup menghadapi berbagai tantangan. Tentara memiliki peranan penting bagi sebuah negara: Pertama, Tentara merupakan tulang punggung dan kekuatan bangsa dan sebagai benteng negara. Oleh karena itu negara tanpa tentara tidak mungkin mempunyai kekuatan untuk mempertahankan negara. Kedua, perjuangan kemerdekaan RI memerlukan kekompakan, kesatuan, kekuatan dan kebersamaan dalam mencapai suatu kekuatan yang kokoh. Adanya organisasi tentara ini dapat menciptakan kekuatan di dalam negara ini. Dengan terbentuknya TNI, Indonesia mempunyai andalan untuk menjaga dan mempertahankan tetap tegaknya RI.

DAFTAR PUSTAKA

- Aboe Bakar Loebis. 1992. *Kilas Balik Revolusi*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Dephankam Pusat Sejarah ABRI. 1976. *Museum Pusat ABRI Satria Mandala*. Jakarta.
- Dinas Sejarah Militer Kodam VII (Diponegoro). 1977. *Rumpun Diponegoro dan Pengabdianannya*. Semarang: Dinas Sejarah Militer Kodam VII (Diponegoro) & C.V. Borobudur Megah.
- Dinas Sejarah Militer TNI-AD. 1975. *Seri Monumen Sejarah TNI-AD*. Jilid I. Jakarta: Dinas Sejarah TNI-AD.
- Hendri Supriyatmono. 1994. *Nasution, Dwifungsi ABRI Dan Kontribusi Ke Arah Reformasi Politik*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Imran Amrin. 1971. *Sejarah Perkembangan Angkatan Darat*. Djakarta: Dephankam Pusat Sejarah.
- Kardiyat Wiharyanto, A. 2011. *Sejarah Indonesia Dari Proklamasi Sampai Pemilu 2009*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Moedjanto, G. 1988. *Indonesia Abad 20, Dari Kebangkitan Nasional sampai Linggajati*, Jilid I. Yogyakarta: Kanisius.
- Moehkardi. 1979. *Pendidikan Perwira TNI-AD di masa Revolusi*. Jakarta: PT. Inaltu.
- Mohammad Hatta. 1954. *Legenda dan Realiteit Sekitar Proklamasi 17 Agustus, Kumpulan Karangan IV*. Jakarta.
- Museum Angkatan Darat Dinas Sejarah Angkatan Darat. 1971. *Buku Penuntun Museum Angkatan Darat*. Jogjakarta: Jajasan Bina Mental Pendidikan Kesedjahteraan.
- Nasution, A.H. 1963. *Tentara Nasional Indonesia*. Jilid I. Djakarta: GONACO N.V.
- Nugroho Notosusanto. 1984. *Pejuang Dan Prajurit*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Pamoe Rahardjo. 1995. *Badan Keamanan Rakyat: Cikal Bakal TNI*. Jakarta: PETA PRESS.

RuslanAbdulgani. 1987.*Indonesia Menatap Masa Depan*. Jakarta: Pustaka Merdeka.

SayidimanSuryohadiprojo.1986.*Langkah-langkah Perjuangan Kita*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Simatupang, T.B. 1981. *Pelopor dalam Perang, Pelopor dalam Damai*. Jakarta:Sinar Harapan.

Sundhaussen, Ulf. 1986. *Politik Militer Indonesia 1945-1967 Menuju Dwi Fungsi ABRI*. Jakarta: LP3ES.

Suwondo Purbo S. 1996. *PETA: Tentara Sukarela Pembela Tanah Air di Jawa dan Sumatra 1942-1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Yahya Muhaimin. 1982. *Perkembangan Militer Dalam Politik Di Indonesia 1945-1966*. Yogyakarta: Gajah Mada University press.

Sumber Internet:

<http://umaam.blogspot.com/2012/05/peran-serta-bkr-dan-tkr.htm> pada tanggal 10 Juli 2014

<http://blogg.0erparengan.blogspot.com/2013/05/foto-pemuda-dan-tni-jaman-kemerdekaan.html> PEMUDA(123) pada tanggal 17 September 2014

<http://abdisuhamdi.com/2012/08/01/tahun-2013-laki-laki-indonesia-wajib-militer.html> pada tanggal 17 September 2014

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lampiran 1

Silabus

Mata Pelajaran : Sejarah Indonesia (Peminatan)

Kelas : XII IPS

Kompetensi Inti :

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan procedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
3.4 Mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi,	Perubahan Badan Keamanan Rakyat menjadi	<ul style="list-style-type: none">• Mengamati Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk	Observasi: <ul style="list-style-type: none">• Mengamati kegiatan peserta didik dengan	2 X 45 menit	<ul style="list-style-type: none">• Aboe Bakar Loebis. 1992. <i>Kilas Balik Revolusi</i>. Jakarta: Universitas

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

<p>politik dan militer pada awal kemerdekaan sampai dengan tahun 1950</p>	<p>Tentara Nasional Indonesia tahun 1945-1948</p> <ul style="list-style-type: none"> • Latar belakang lahirnya Badan Keamanan Rakyat • Proses perkembangan Badan Keamanan Rakyat menjadi Tentara Nasional Indonesia • Pengaruh pembentukan Tentara Nasional Indonesia 	<p>membaca buku teks, browsing di internet dan diskusi dengan teman di sampingnya tentang materi perubahan Badan Keamanan Rakyat menjadi Tentara Nasional Indonesia dari tahun 1945-1948.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menanya Guru memberikan kesempatan bertanya kepada peserta didik untuk bertanya, memberi komentar dan berinteraksi tentang materi perubahan Badan Keamanan Rakyat menjadi 	<p>menggunakan lembar observasi dalam proses mengumpulkan data, dan pembuatan laporan tentang peristiwa perubahan Badan Keamanan Rakyat menjadi Tentara Nasional Indonesia tahun 1945-1948.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Makalah Menilai laporan makalah peserta didik tentang 		<p>Indonesia Press.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Sejarah Militer Kodam VII (Diponegoro). 1977. <i>Rumpun Diponegoro dan Pengabdiannya</i>. Semarang: Dinas Sejarah Militer Kodam VII (Diponegoro) & C.V. Borobudur Megah. • Dinas Sejarah Militer TNI-AD.1975. <i>Seri Monumen Sejarah TNI-AD</i>. Jilid I. Jakarta: Dinas Sejarah TNI-AD. • Dephankam Pusat
---	--	--	--	--	---

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

		<p>Tentara Nasional Indonesia dari tahun 1945-1948.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengumpulkan Inspirasi <p>Guru membagi siswa kedalam 3 kelompok yang beranggotakan 6-7 orang, kemudian setiap kelompok mendapatkan tugas yang berbeda untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan latar belakang terjadinya perubahan Badan Keamanan Rakyat menjadi Tentara Nasional Indonesia dari tahun 1945-1948. 	<p>peristiwa perubahan Badan Keamanan Rakyat menjadi Tentara Nasional Indonesia tahun 1945-1948.</p> <p>Tes tertulis:</p> <p>Menilai kemampuan peserta didik dalam penguasaan materi perubahan Badan Keamanan Rakyat menjadi Tentara Nasional Indonesia tahun 1945-1948.</p>		<p>Sejarah ABRI. 1976. <i>Museum Pusat ABRI Satria Mandala</i>. Jakarta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hendri Supriyatmono. 1994. <i>Nasution, Dwifungsi ABRI Dan Kontribusi Ke Arah Reformasi Politik</i>. Surakarta: Sebelas Maret University Press. • Imran Amrin. 1971. <i>Sejarah Perkembangan Angkatan Darat</i>. Djakarta: Dephankam Pusat Sejarah.
--	--	---	---	--	---

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

		<p>2. Mendeskripsikan proses terjadinya perubahan Badan Keamanan Rakyat menjadi Tentara Nasional Indonesia dari tahun 1945-1948.</p> <p>3. Menganalisis pengaruh Perubahan Badan Keamanan Rakyat menjadi Tentara Nasional Indonesia dari tahun 1945-1948.</p> <p>Selanjutnya guru membimbing siswa untuk dapat menemukan informasi yang berkaitan dengan tugas yang telah</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Kardiyat Wiharyanto. 2011. <i>Sejarah Indonesia dari Proklamasi Sampai Pemilu 2009</i>. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma. • Mohammad Hatta. 1954. <i>Legenda dan Realiteit Sekitar Proklamasi 17 Agustus, Kumpulan Karangan IV</i>. Jakarta.
--	--	---	--	--

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

		<p>diberikan. Kemudian siswa menyiapkan jawaban atas tugas dalam bentuk power point untuk dipresentasikan di kelas.</p> <ul style="list-style-type: none">• Mengorganisasi Menganalisis informasi dan data yang didapat dari bacaan maupun internet untuk mendapatkan kesimpulan tentang materi perubahan Badan Keamanan Rakyat menjadi Tentara Nasional Indonesia dari tahun 1945-1948.		
--	--	---	--	--

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

		<ul style="list-style-type: none">• Membangun jejaring Peserta didik mengkomunikasikan hasil diskusi dan presentasi sehingga dapat menyimpulkan materi yang telah di pelajari.		
--	--	---	--	--

Mengetahui

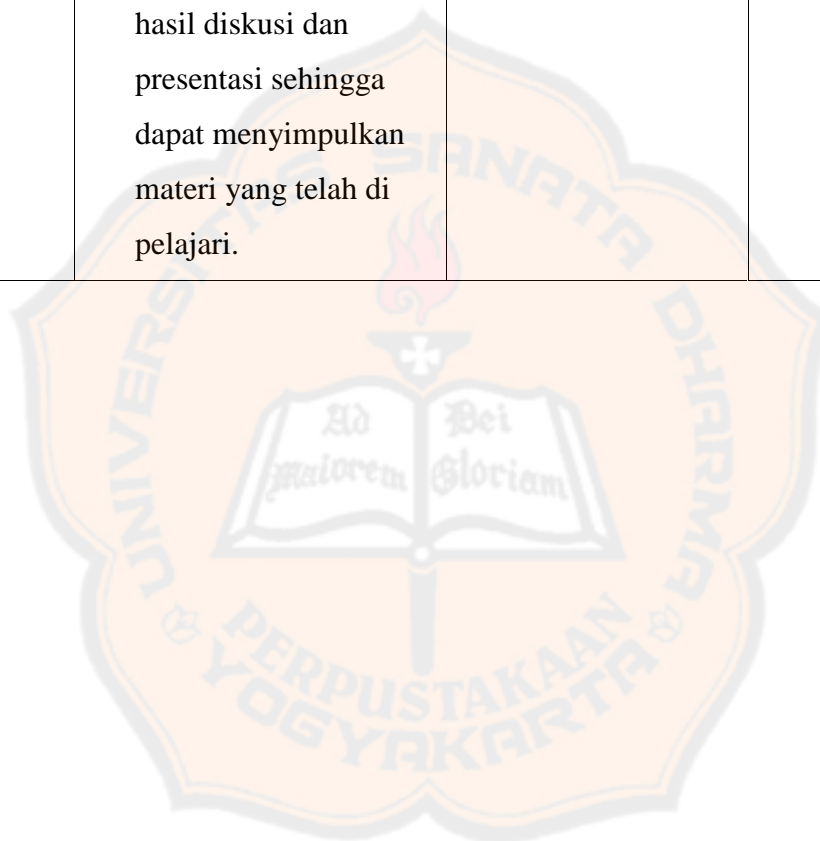
Kepala Sekolah

Sutejo Simon, S. Pd.

Yogyakarta, 21 Agustus 2014

Guru Mata Pelajaran

Geovani Louisa G.C, S. Pd.



*Lampiran II***RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)**

Satuan Pendidikan : SMA Pangudi Luhur Giriwoyo
Mata Pelajaran : Sejarah
Kelas/ Semester : XII/ 2
Materi Pokok : Perubahan Badan Keamanan Rakyat menjadi Tentara Nasional Indonesia dari tahun 1945-1948: sikap patriotik Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pertemuan Ke- : 7
Alokasi Waktu : 2 X 45 menit

A. Kompetensi Inti (KI)

- KI 1: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
- KI 2: Menghayati, mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
- KI 3: Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan procedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
- KI 4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkrit dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator

- 1.1 Menghayati proses perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan menunjukkan rasa syukur terhadap rahmat dan karunia-Nya.
- 2.1 Menunjukkan sikap empati terhadap para pejuang dan mengamalkan nilai-nilai kejuangan para pahlawan dalam kehidupan sehari-hari.
- 3.4 Mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi, politik dan militer pada awal kemerdekaan sampai dengan tahun 1950.
 - 3.4.1 Mendeskripsikan latar belakang perubahan Badan Keamanan Rakyat menjadi Tentara Nasional Indonesiadari tahun 1945-1948.
 - 3.4.2. Mendeskripsikan proses terjadinya perubahan Badan Keamanan Rakyat menjadi Tentara Nasional Indonesiadari tahun 1945-1948.
 - 3.4.3 Menganalisis pengaruh terjadinya perubahan Badan Keamanan Rakyat menjadi Tentara Nasional Indonesiadari tahun 1945-1948.
- 4.4 Menyajikan informasi dalam bentuk tulisan tentang kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi, politik dan militer pada awal kemerdekaan sampai dengan tahun 1950.
 - 4.4.1 Menjelaskan berbagai pertempuran yang dilakukan TNI dalam revolusi fisik melalui penulisan makalah.

C. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini peserta didik diharapkan mampu :

1. Memahami latar belakang perubahan Badan Keamanan Rakyat menjadi Tentara Nasional Indonesiadari tahun 1945-1948.
2. Memahami proses terjadinya perubahan Badan Keamanan Rakyat menjadi Tentara Nasional Indonesiadari tahun 1945-1948.
3. Memahami pengaruh terjadinya perubahan Badan Keamanan Rakyat menjadi Tentara Nasional Indonesiadari tahun 1945-1948.
4. Melalui tugas membuat makalah peserta didik dapat menjelaskan berbagai pertempuran TNI dalam revolusi fisik.

D. Materi Pembelajaran

Perubahan Badan Keamanan Rakyat menjadi Tentara Nasional Indonesia dari tahun 1945-1948.

1. Latar belakang perubahan Badan Keamanan Rakyat menjadi Tentara Nasional Indonesiadari tahun 1945-1948.
2. Proses terjadinya perubahan Badan Keamanan Rakyat menjadi Tentara Nasional Indonesiadari tahun 1945-1948.
3. Pengaruh terjadinya perubahan Badan Keamanan Rakyat menjadi Tentara Nasional Indonesiadari tahun 1945-1948.

E. Pendekatan, Strategi dan Metode

Pendekatan : Saintifik learning
 Strategi : *Cooperative Jigsaw*
 Metode : Diskusi

F. Media dan Sumber Pembelajaran

1. Media : Papan tulis, LCD, dan Power Point

2. Sumber Belajar:

Aboe Bakar Loebis. 1992. *Kilas Balik Revolusi*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Dinas Sejarah Militer Kodam VII (Diponegoro). 1977. *Rumpun Diponegoro dan Pengabdiannya*. Semarang: Dinas Sejarah Militer Kodam VII (Diponegoro) & C.V. Borobudur Megah.

Dinas Sejarah Militer TNI-AD.1975. *Seri Monumen Sejarah TNI-AD*. Jilid I. Jakarta: Dinas Sejarah TNI-AD.

Dephankam Pusat Sejarah ABRI. 1976.*Museum Pusat ABRI Satria Mandala*. Jakarta.

HendriSupriyatmono. 1994. *Nasution, Dwifungsi ABRI Dan KontribusiKe Arah Reformasi Politik*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.

G. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan	Deskripsi	Alokasi Waktu
1. Pendahuluan	a. Guru mengucapkan salam b. Guru mengabsen siswa c. Guru mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi. Misalnya: bagaimana awal pembentukan BKR? d. Guru menuliskan tujuan pembelajaran	10'
2. Inti	<p>A. Mengamati</p> <p>Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membaca buku teks, browsing di internet dan diskusi dengan teman di sampingnya tentang materi perubahan Badan Keamanan Rakyat menjadi Tentara Nasional Indonesia dari tahun 1945-1948.</p> <p>B. Menanya</p> <p>Guru memberikan kesempatan bertanya kepada peserta didik untuk bertanya, memberi komentar dan berinteraksi tentang materi perubahan Badan Keamanan Rakyat menjadi Tentara Nasional Indonesia dari tahun 1945-1948.</p> <p>C. Mengumpulkan Informasi</p> <p>Guru membagi siswa kedalam 3 kelompok yang beranggotakan 6-7</p>	60'

	<p>orang, kemudian setiap kelompok mendapatkan tugas yang berbeda untuk:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menjelaskan latar belakang terjadinya perubahan Badan Keamanan Rakyat menjadi Tentara Nasional Indonesia dari tahun 1945-1948.2. Mendeskripsikan proses terjadinya perubahan Badan Keamanan Rakyat menjadi Tentara Nasional Indonesia dari tahun 1945-1948.3. Menganalisis pengaruh perubahan Badan Keamanan Rakyat menjadi Tentara Nasional Indonesia dari tahun 1945-1948. <p>Selanjutnya guru membimbing siswa untuk dapat menemukan informasi yang berkaitan dengan tugas yang telah diberikan. Kemudian siswa menyiapkan jawaban atas tugas dalam bentuk power point untuk dipresentasikan di kelas.</p> <p>D. Mengorganisasi</p> <p>Menganalisis informasi dan data yang didapat dari bacaan maupun internet untuk mendapatkan kesimpulan tentang materi</p>	
--	---	--

	<p>perubahan Badan Keamanan Rakyat menjadi Tentara Nasional Indonesia dari tahun 1945-1948.</p> <p>E. Mengkomunikasikan</p> <p>Setiap kelompok secara bergiliran mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas secara lisan dan kelompok lain menyimak dan mencatat informasi dari kelompok yang presentasi.</p>	
3. Penutup	<p>a. Guru menyimpulkan materi yang dipelajari hari ini.</p> <p>b. Guru menanyakan kepada peserta didik apakah sudah memahami materi tersebut atau belum.</p> <p>c. Guru memberikan pertanyaan lisan secara acak kepada peserta didik untuk mendapatkan umpan balik atas pembelajaran yang baru saja dilakukan.</p> <p>d. Sebagai refleksi guru memfasilitasi peserta didik untuk membuat kesimpulan dari pembelajaran yang telah dilaksanakan.</p> <p>e. Guru melakukan evaluasi untuk mengukur ketercapaian tujuan belajar.</p> <p>f. Guru memberikan tugas selanjutnya berupa penulisan makalah tentang pertempuran TNI di daerah-daerah pada masa</p>	10'

	revolusi fisik tahun 1945-1948.	
--	---------------------------------	--

H. Penilaian Proses dan Hasil Belajar :

1. Teknik: tes dan non tes
2. Bentuk: uraian, penulisan makalah, lembar penilaian pengamatan

A. Tes:

1. Sebutkan faktor-faktor strategi dan kebijakan tentang pembentukan BKR?
2. Sebutkan hasil penetapan sidang PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945!
3. Sebutkan daerah-daerah yang menjadi pembentukan awal Badan Keamanan Rakyat?
4. Sebutkan isi pidato Soekarno pada tanggal 23 Agustus 1945 mengenai Badan Keamanan Rakyat!

Kunci Jawaban:

1. a. Kendala tantangan dalam negeri
 - sikap Jepang
 - pertimbangan Politis-Psikologis
- b. Tantangan luar negeri
 - Mendapatkan pengakuan dari Sekutu terhadap keberadaan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.
 - Mengakhiri secara sah kekuasaan Belanda atas Indonesia yang secara hukum Internasional masih diakui Sekutu sebagai wilayah jajahan Belanda.
2. a. Badan Keamanan Rakyat memiliki tugas pemeliharaan keamanan bersama-sama dengan rakyat dan jawatan-jawatan negeri yang bersangkutan.
- b. Badan Keamanan Rakyat merupakan suatu bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang, didirikan dari pusat sampai ke daerah-daerah.
- c. pekerjaan harus dilakukan dengan sukarela.
3. a. Jakarta
- b. Bogor

- c. Jawa Tengah dan Jawa Timur
4. Saya mengharapkan kepada kamu sekalian, hai mantan prajurit-prajurit PETA, *Heiho*, Pelaut beserta pemuda-pemuda lain untuk sementara waktu masuklah dan bekerjalah dalam Badan Keamanan Rakyat.

Pedoman penskoran

Nomor soal	Kriteria penilaian	Skor
1	Jawaban benar dan lengkap	5
2	Jawaban benar tetapi tidak lengkap	3
3	Jawaban kurang benar	2
4	Jawaban salah	1
5	Tidak dijawab	0

Kriteria penilaian

- 96-100 : amat baik
 86-95 : baik
 75-85 : cukup
 <75 : kurang

B. Non tes (Terlampir)

Buatlah makalah tentang pertempuran TNI di daerah-daerah pada masa revolusi fisik tahun 1945-1948 (minimal 7 halaman, dikumpulkan pada tanggal 25 Oktober 2014).

Yogyakarta, 16 Agustus 2014

Kepala Sekolah

Guru Bidang Studi

Sutejo Simon. S.Pd.

Geovani Louisa G.C, S. Pd

Lampiran 1:

Lembar Pengamat Diskusi Kelompok

Mata Pelajaran : SEJARAH (MINAT)
Kelas : XII
Kompetensi Dasar : Mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi, politik dan militer pada awal kemerdekaan sampai dengan tahun 1950
Materi Pokok : Perubahan Badan Keamanan Rakyat menjadi Tentara Nasional Indonesia dari tahun 1945-1948

Hari / tanggal pengamatan : 28 Agustus 2014

1. Penilaian dilakukan selama kegiatan diskusi
2. Hasil penilaian ini digunakan untuk mengetahui tingkat aktivitas peserta didik
3. Pedoman Penilaian

No	Nama	Keaktifan dalam Kelompok					Kerjasama Kelompok					Tanggungjawab					Kejujuran					Menghargai Pendapat orang lain					Jml
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	

4. Keterangan Skor dan kategori
 Kriteria penilaian menggunakan skala likert 1-5 dengan kriteria
 Skor 1 : Pasif, tidak bisa bekerjasama, tidak bertanggungjawab, tidak jujur, tidak menghargai pendapat teman
 Skor 2 : Pasif, tidak bisa bekerjasama, tidak bertanggungjawab, tidak jujur, menghargai pendapat teman
 Skor 3 : Pasif, tidak bisa bekerjasama, bertanggungjawab, jujur, menghargai pendapat teman
 Skor 4 : Pasif, bisa bekerjasama, bertanggungjawab, jujur, menghargai pendapat teman
 Skor 5 : Aktif, bisa bekerjasama, bertanggungjawab, jujur, menghargai pendapat teman

Skor maksimal = 25

N = (skor perolehan : skor maksimal) x100

LAMPIRAN 2:

TUGAS MANDIRI TERSTRUKTUR

Sekolah : SMA Pangudi Luhur Giriwoyo

Mata Pelajaran : Sejarah

Kelas : XII

Kompensi Dasar	Indikator	Kegiatan	Waktu	Keterangan
4.4 Menyajikan informasi dalam bentuk tulisan tentang kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi, politik dan militer pada awal kemerdekaan sampai dengan tahun 1950.	4.4.1 menjelaskan berbagai pertempuran yang dilakukan TNI dalam revolusi fisik melalui makalah	Peserta didik membuat makalah mengenai pertempuran yang dilakukan TNI dalam revolusi fisik	Dikumpulkan pada tanggal 10 Oktober 2014	Tugas terstruktur Individu

Lampiran 3:

INSTRUMEN TUGAS MANDIRI TERSTRUKTUR

- A. Kompetensi Dasar :
 - 4.4 Menyajikan informasi dalam bentuk tulisan tentang kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi, politik dan militer pada awal kemerdekaan sampai dengan tahun 1950.
- B. Indikator Pencapaian Kompetensi :
 - 4.4.1 menjelaskan berbagai pertempuran yang dilakukan TNI dalam revolusi fisik melalui makalah.
- C. Jenis Tugas : Individu
- D. Tanggal pemberian tugas : 30 Agustus 2014
- E. Waktu Pelaksanaan : 1 minggu
- F. Batas waktu pengumpulan : 7 September 2014
- G. Deskripsi tugas :
 - 1. Bentuk tugas : Membentuk makalah mengenai pertempuran yang dilakukan TNI dalam revolusi fisik
 - 2. Tempat/sumber : Buku siswa, internet
 - 3. Waktu : Di luar jam pelajaran
 - 4. Target : Memahami pertempuran yang dilakukan TNI dalam revolusi fisik
 - 5. Rubik Penilaian

No	Indikator	Nilai kualitatif	Nilai kuantitatif	Keterangan
1	Tugas yang dikumpulkan sesuai dengan yang diminta			
2	Ketepatan waktu mengumpulkan tugas			
3	Kerapian tugas			
4	Sistematika tugas			
5	Ketepatan komentar			
	Nilairata-rata			

KETERANGAN

NILAI KUALITATIF	NILAI KUANTITATIF	
Memuaskan (A)	4	>80
Baik (B)	3	68-79
Cukup (C)	2	56-67

Kurang (D)	1	<55
------------	---	-----

Bukti fisik : terlampir

Lampiran 4: Materi

A. Latar Belakang Proses Lahirnya BKR

Sewaktu Jepang menyerah kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, terjadilah kevakuman kekuasaan di Indonesia, dalam kevakuman ini antara kelompok pemuda di Jakarta dengan Soekarno-Hatta ada perbedaan mengenai cara mereka hendak memproklamasikan kemerdekaan. Golongan muda tidak setuju dengan alasan golongan tua, golongan muda menganggap PPKI adalah badan bentukan Jepang. Mereka tidak menyetujui lahirnya proklamasi kemerdekaan, sebaliknya mereka berpendapat bahwa proklamasi harus dilahirkan dengan kekuatan sendiri lepas dari pemerintah Jepang.

Kedua pendirian tersebut di pertemukan dalam rapat PPKI, akhirnya tanggal 17 Agustus 1945 beliau membacakan teks proklamasi hal tersebut di atas disambut oleh rakyat secara spontan dan penuh antusias. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebagai negara yang telah merdeka harus memiliki alat kelengkapan negara. Salah satu diantaranya adalah tentara sebagai alat pertahanan negara.

Pada 19 Agustus 1945, dua orang anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yaitu *Abikusno Tjokrosujoso* dan *Otto Iskandardinata*, dalam sidang pada hari itu mengusulkan pembentukan sebuah badan pembelaan negara. Usul tersebut ditolak dengan alasan memancing bentrokan dengan tentara pendudukan Jepang yang masih bersenjata lengkap dan adanya ancaman intervensi Tentara Sekutu yang bertugas melucuti persenjataan tentara Jepang dan memulangkan mereka ke negerinya. Demikian usul untuk membentuk suatu tentara kebangsaan yang terdiri dari mantan prajurit PETA, *Heihodan* Angkatan Laut ditangguhkan.

Pada 20 Agustus 1945, dibentuklah Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP). BPKKP semula bernama Badan Pembantu Prajurit dan kemudian berubah menjadi Badan Pembantu Pembelaan yang keduanya disingkat

BPP. Pembentukan BPP sudah ada dalam zaman Jepang dan bertugas memelihara kesejahteraan anggota tentara PETA dan *Heiho*. Setelah PETA dan *Heiho* dibubarkan oleh Jepang tanggal 18 Agustus 1945, maka tugas untuk menampung mantan anggota PETA dan *Heiho* ditangani oleh Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP).

Seiring dengan itu didirikan pula Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang merupakan bagian dari BPKKP. Berita tentang pembentukan BPKKP dan BKR segera dimuat untuk dikomunikasikan dalam harian surat kabar *Soeara Asia* yang terbit pada 25 Agustus 1945. Di wilayah Jawa dan Sumatera, sebagai jawaban atas proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia maka muncullah berbagai badan perjuangan yang menamakan diri mereka barisan, pasukan atau pemuda.

Dalam sidang tanggal 22 Agustus 1945 yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta, PPKI menetapkan:

- a. Badan Keamanan Rakyat memiliki tugas pemeliharaan keamanan bersama-sama dengan rakyat dan jawatan-jawatan negeri yang bersangkutan.
- b. BKR merupakan suatu bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang. Didirikan dari pusat sampai ke daerah-daerah.
- c. Pekerjaannya harus dilakukan dengan sukarela.

Semula BKR dimaksudkan sebagai suatu bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP). Hal ini terlihat aneh, tetapi memang demikian kenyataannya. Adapun tugas dari BPKKP itu secara resmi berbunyi, “menjamin kepada rakyat yang menderita akibat peperangan berupa pertolongan dan bantuan dengan memelihara keselamatan dan keamanan”.

Pembentukan BKR adalah sebagai penampungan organisasi-organisasi pembelaan negara dalam wadah nasional. BKR bukan tentara, tetapi korps pejuang bersenjata yang bertugas menjamin keamanan umum, namun kenyataannya nanti, BKR ini telah berperan pula sebagai alat penegak kedaulatan dan pertahanan negara.

B. Proses perubahan Badan Keamanan Rakyat menjadi Tentara Nasional Indonesia dari tahun 1945-1948.

1. Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, adalah sumber dari seluruh tatanan dan kehidupan politik bagi Indonesia sebagai negara baru. Sehari sesudah pernyataan kemerdekaan itu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mulai mengadakan tiga kali sidang untuk membicarakan hal-hal yang *urgen* sehubungan dengan telah berdirinya Republik Indonesia. Sidang tersebut yaitu:
2. Sidang pada tanggal 18 Agustus 1945, mengambil keputusan yang berupa: mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara (UUD 45) dan memilih presiden serta wakil presiden yang secara aklamasi terpilih ialah masing-masing Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta.
3. Sidang pada tanggal 19 Agustus 1945, dalam sidang ini Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan keputusan-keputusan: membentuk kabinet sebagai badan eksekutif dengan dua belas departemen yang masing-masing dikepalai oleh seorang menteri; pada saat itu pula ditunjuk orang-orangnya, kecuali jabatan menteri pertahanan yang masih dilowongkan untuk beberapa lama yang tidak ditentukan.

Demikian pada tanggal 5 Oktober 1945 BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Sesuai dengan namanya, fungsi utama TKR masih tetap memelihara keamanan dalam negeri dan bukan menghadapi musuh dari luar namun demikian, setidaknya statusnya sudah ditingkatkan menjadi tentara. Dengan menggunakan nama baru itu, dari segi struktur ia mengalami perbaikan. Untuk sebagian besar hal itu dimungkinkan berkat adanya perwira-perwira didikan Belanda yang masuk BKR. Sementara para bekas opsir PETA tidak pernah mendapat pendidikan staf, para bekas opsir KNIL itu setidaknya telah berpengalaman sekedarnya dalam melakukan tugas-tugas staf dan oleh sebab itu mereka lebih memenuhi persyaratan untuk tugas yang berkaitan dengan pengorganisasian dan perencanaan militer.

Maksud dan tujuan dibentuknya TKR adalah seperti dijelaskan oleh Balai Penerangan Markas Tertinggi Tentara Keamanan Rakyat saat lahirnya tanggal 5 Oktober 1945, yang antara lain mengatakan bahwa TKR tidaklah dijadikan alat dalam melakukan perampasan hak-hak orang lain, tidak digunakan untuk

melakukan angkara murka, tetapi di bentuk menjamin keamanan dan ketentraman negara. Disini rakyat harus merasa dilindungi dan dibela kehidupannya. TKR bukanlah suatu tentara yang menindas rakyat, tetapi sebaliknya, ia merupakan sebuah sarana yang juga membangkitkan semangat rakyat guna pembangunan negara Republik Indonesia.

Terbentuknya Tentara Keamanan Rakyat merupakan langkah baru dari pembangunan tentara nasional, Badan Keamanan Rakyat sebagai embrionya menjelma menjadi Tentara Keamanan Rakyat. Perubahan telah terjadi dalam sejarah Indonesia. Kebijakan pemerintah untuk tidak segera membentuk sebuah tentara akhirnya berubah dan dirasakan perlunya segera membentuk tentara guna menyelamatkan negara. Untuk itulah pemerintah mengeluarkan maklumat tentang pembentukan Tentara Keamanan Rakyat.

Situasi tersebut menyebabkan terjadi kesulitan karena tindakan laskar yang mengambil inisiatif sendiri di luar kontrol pusat. Karena itu sistem desentralisasi terpaksa diadakan. Untuk mengantisipasi agar pertentangan itu tidak berlanjut, maka Presiden Soekarno sebagai Panglima Tertinggi mengeluarkan dekrit pada tanggal 5 Mei 1947 untuk membentuk TNI yang berisi sebagai berikut:

“Karena situasi dan kondisi, maka dengan ini diinstruksikan untuk mempersatukan TRI dan laskar-laskar menjadi TNI, yang pelaksanaannya diserahkan kepada sebuah panitia yang diketahui oleh Panglima Tertinggi dengan memasukkan ke dalamnya berbagai badan, baik resmi maupun tidak resmi yang ada sangkut pautnya dengan pembelaan negara”.

Dengan kerja keras antara pemerintah dan pihak militer, maka terbentuklah TNI di mana laskar-laskar dan badan perjuangan melebur di dalamnya. Sehubungan dengan itu juga TNI menggunakan sistem sentralisasi untuk memudahkan pengontrolan. Kekuatan militer inilah yang berperan dalam upaya mempertahankan kedaulatan RI.

Adanya dua macam bala bersenjata, yaitu TRI sebagai tentara reguler disatu pihak dan badan perjuangan dilain pihak sangat tidak menguntungkan perjuangan. Banyak laskar yang berhaluan sesuai dengan politik partai dimana ia bernaung. Hal ini disadari oleh pemerintah yang berusaha sekuat tenaga untuk

mempersatukan kedua bala bersenjata ini. Setelah usaha yang sulit pada tanggal 7 Juni 1947 Presiden mengeluarkan penetapan Presiden yang isinya antara lain:

1. Mulai tanggal 3 Juni 1947 disahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan dinyatakan semua laskar serta badan perjuangan secara serentak dimasukan kedalam TNI.
2. Pemimpin TNI dipegang oleh pucuk pimpinan TNI yang merupakan pimpinan kolektif yang terdiri atas kepala dan anggotanya. Kepala pucuk pimpinan: Panglima Besar Angkatan Perang atau Jenderal Soedirman. Anggota-anggota: Letnan Jenderal Urip Sumoharjo, Laksamana Muda M. Nasir, Komandor Muda S. Suryadarma, Suetomo atau Bung Tomo, Ir. Sakirman dan Joko Sujono. Tugas pucuk pimpinan adalah melaksanakan tugas operasional dan menyempurnakan organisasi.

Presiden mengeluarkan dekrit guna membentuk suatu panitia yang dipimpin oleh Presiden sendiri. Panitia negara ini kemudian bernama "Panitia Pembentukan Organisasi Tentara Nasional Indonesia" dengan beranggotakan sebanyak 21 orang dari pimpinan pasukan-pasukan bersenjata termasuk di dalamnya pemimpin-pemimpin beberapa laskar yang paling berpengaruh kuat. Pada tanggal 7 Juni 1947, keluar sebuah Penetapan Presiden yang membentuk satu organisasi tentara bernama "Tentara Nasional Indonesia" disingkat TNI.

C. Pengaruh perubahan Badan Keamanan Rakyat menjadi Tentara Nasional Indonesia dari tahun 1945-1948.

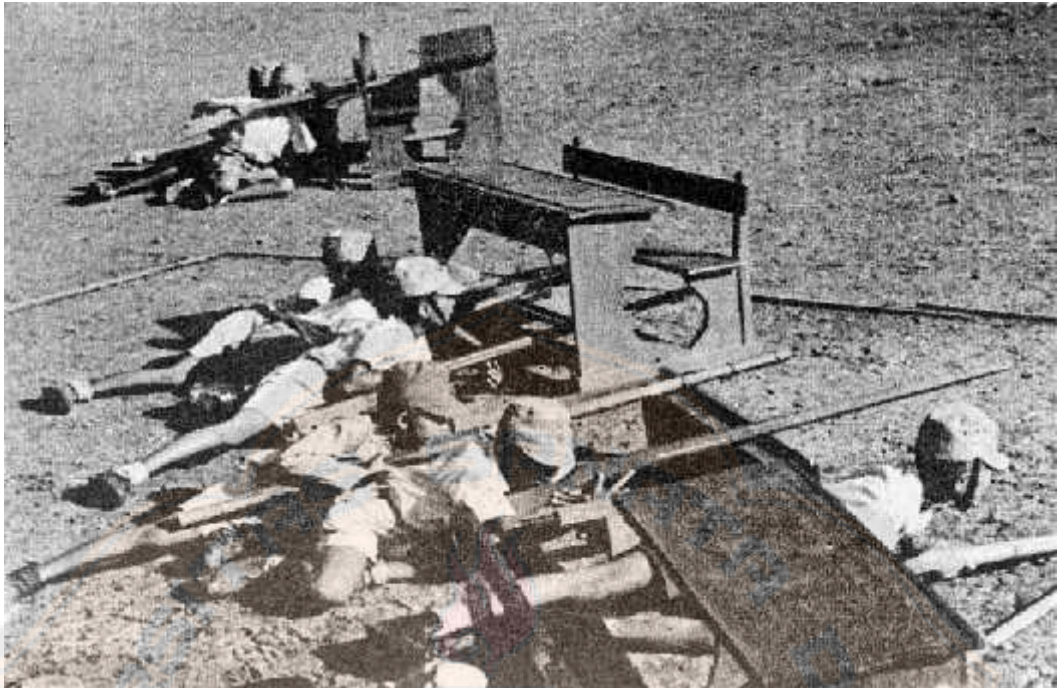
Dengan adanya pengaruh pembentukan TNI, berarti pemerintah berhasil menyatukan seluruh laskar-laskar perjuangan sehingga menjadi satu komando (panglima). Ini berarti berarti bahwa TNI berasal dari tiga elemen pokok atau tiga unsur pokok yang masing-masing memiliki karakteristik yang berlain-lainan dan bahkan sifat yang heterogen, yaitu bekas-bekas tentara KNIL, PETA dan Laskar.

Pada saat-saat kritis selama Perang Kemerdekaan (1945-1949), TNI berhasil mewujudkan dirinya sebagai tentara rakyat, tentara revolusi, dan tentara nasional. Sebagai kekuatan yang baru lahir, disamping TNI menata dirinya, pada waktu yang bersamaan harus pula menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dari dalam negeri, TNI menghadapi rongrongan-rongrongan baik yang berdimensi politik maupun dimensi militer. Rongrongan

politik bersumber dari golongan Komunis yang ingin menempatkan TNI dibawah pengaruh mereka melalui Pepolit, Biro Perjuangan, dan TNI-Masyarakat, adapun yang lainnya tantangan dari dalam negeri yang berdimensi militer yaitu TNI menghadapi pergolakan bersenjata di beberapa daerah dan pemberontakan PKI di Madiun serta Darul Islam (DI) di Jawa Barat sebuah organisasi orang Islam militan, yang bermaksud membentuk negara Islam Indonesia, hal ini dapat mengancam integritas nasional.

Tantangan dari luar negeri yaitu TNI dua kali menghadapi Agresi Militer Belanda yang memiliki organisasi dan persenjataan yang lebih modern dari pada yang terdahulunya. Sadar akan keterbatasan TNI dalam menghadapi agresi Belanda, maka bangsa Indonesia melaksanakan Perang Rakyat Semesta dimana segenap kekuatan TNI dan masyarakat serta sumber daya nasional dikerahkan untuk menghadapi agresi tersebut, dan perlawanan ini merupakan kesadaran, tekad, sikap dan pandangan seluruh rakyat Indonesia untuk menangkal, mencegah menggagalkan dan menumpas setiap ancaman yang membahayakan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, integritas dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dapat dipertahankan oleh kekuatan TNI bersama rakyat.

Lampiran III



Badan Keamanan Rakyat (BKR) pada saat pelatihan

(diadaptasi dari: <http://bloggerparengan.blogspot.com/2013/05/foto-pemuda-dan-tni-jaman-kemerdekaan.html> PEMUDA(123) pada tanggal 17 September 2014)



Tentara Keamanan Rakyat (TKR)



Jenderal Soedirman



Letnan Jenderal Urip Sumoharjo



Markas TKR pertama di Gondokusuman Yogyakarta, saat ini menjadi museum Dharma Wiratama